

RENCANA STRATEGIK

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU-HPT) PELAIHARI TAHUN 2016-2020



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BPTU-HPT PELAIHARI
2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya rencana strategik (Renstra) BPTU-HPT Pelaihari periode tahun 2016-2020 telah selesai disusun. Renstra memuat Visi dan Misi BPTU-HPT Pelaihari serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan bisa diselesaikan dengan baik. Dasar pertimbangan dengan berlakunya sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan program dilakukan dengan pendekatan terintegrasi untuk menghasilkan satu kesatuan output dan kinerja.

Menerjemahkan Visi dan Misi BPTU-HPT Pelaihari, Direktorat Jendral Kesehatan hewan, maka disusun Rencana Strategik BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2016-2020. Dokumen ini menguraikan pokok-pokok pikiran pembangunan bidang peternakan; kinerja, permasalahan dan tantangan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta program pembangunan usaha agribisnis peternakan. Rencana Strategik BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2016-2020 disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan pertanian dan peternakan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan.

Demikian Rencana Strategis BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2016-2020 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan peternakan di wilayah kerja.

Kalimantan, Desember 2014

KEPALA BPTU-HPT PELAIHARI,

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015 – 2019.....	7
1.3 Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan....	9
1.4 Pengertian.....	12
1.5 Landasan Hukum.....	12
1.6 Maksud dan Tujuan.....	
BAB II KONDISI UMUM BPTU-HPT PELAIHARI.....	14
2.1 Sejarah BPTU-HPT Pelaihari.....	14
2.2 Visi dan Misi BPTU-HPT Pelaihari.....	15
2.3 Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi	16
2.4 Program Utama BPTU-HPT Pelaihari.....	20
2.5 Wilayah Pelayanan.....	21
2.6 Potensi BPTU-HPT Pelaihari.....	21
2.7 Capaian kinerja periode 2009-2014.....	27
2.8 Analisis SWOT.....	32
2.9 Issue-Issue Strategis.....	45
BAB III SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN.....	49
3.1. Sasaran.....	49
a. Sasaran yang telah tercapai (capaian 2010-2014).....	50
b. Sasaran yang akan dicapai (capaian 2015-2019).....	51
c. Analisis Penyebab keberhasilan dan kegagalan.....	54
3.2. Strategi dan Pendekatan.....	54
1. Strategi Internal.....	54
a. Anggaran.....	55
b. Penguatan organisasi balai.....	57
c. Sarana dan prasarana.....	59
d. Pelayanan dan manajemen.....	62
e. Pengembangan teknologi.....	65
2. Strategi Eksternal.....	66
a. Sosialisasi.....	66
b. Sinkronisasi kebijakan.....	67
c. Kerjasama dan kemitraan.....	69
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	72
4.1 Optimalisasi Pembibitan on Farm.....	72
a. Pemurnian dan Persilangan Ternak Kambing, itik, dan sapi madura.....	72
b. Produksi, Pemeliharaan dan Pemuliaan Kambing, Itik, dan Sapi Madura.....	73
4.2 Pengembangan Pembibitan Kambing, Itik dan Sapi Madura di Masyarakat.....	74
a. Pengembangan Pembibitan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura.....	74
b. Monitoring Kawasan Pembibitan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura.....	75
c. Pembinaan Kawasan Pembibitan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura....	76
4.3 Pengembangan Hijauan Pakan ternak.....	77
a. Kuantitas (jumlah)	77

b. Kualitas (Mutu)	77
c. Varian (jenis)	78
4.4 Penguatan Kelembagaan Balai.....	78
a. Peningkatkan kualitas SDM.....	78
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan.....	79
c. Kegiatan koordinasi Internal	79
4.5 Pengembangan sarana prasarana Balai.....	79
a. Operasional pemeliharaan Fasilitas UPT.....	79
b. Peningkatan fasilitas UPT.....	80
4.6 Kerjasama dan Kemitraan.....	81
a. Pemerintah Daerah.....	81
b. Swasta.....	81
c. Asing.....	81
d. Peternak	82
4.7 Pelatihan dan Pembinaan Peternak Kambing, Itik dan Sapi Madura.....	82
a. Pelatihan peternak.....	83
b. Pembinaan peternak.....	83
4.8 Pengembangan teknologi terapan Pembibitan Kambing, Itik dan Sapi Madura	83
a. Update teknologi.....	83
b. Inovasi teknologi.....	83
BAB V PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA	84
5.1 Pengukuran Kinerja	84
5.2 Evaluasi Kinerja	86
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN	88
6.1 Pedoman Pelaksanaan	88
6.2 Metode Pelaksanaan	88
6.3 Monitoring dan Evaluasi	88
BAB VII PENUTUP.....	89
LAMPIRAN	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1. latar belakang

Produksi kambing peranakan Ettawa, itik Alabio, ayam Arab, sapi Bali, dan sapi Simbara (*Simental Brahman*) semakin prospektif di masa akan datang. Hal ini sejalan dengan kecenderungan pertumbuhan kebutuhan akan komoditas hewan tersebut yang semakin meningkat, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Sementara pada saat yang sama, produksinya masih jauh di bawah tingkat memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, usaha produksi komoditas kambing, sapi madura, dan itik perlu didorong melalui berbagai langkah dan kebijakan yang kondusif agar dapat lebih berkembang dan lebih produktif. Potensi permintaan akan daging di Indonesia sangat besar. Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 250 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,5% pertahun dan elastisitas permintaan daging yang tinggi, maka peningkatan pendapatan dan pertambahan penduduk secara nyata meningkatkan jumlah permintaan akan daging setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata turut berpengaruh sangat besar terhadap permintaan daging sapi nasional. Berdasarkan penelitian pada tahun 2015 konsumsi daging sapi mencapai 2,56 kilogram (kg) per kapita per tahun, maka jumlah total kebutuhan daging nasional akan mencapai 653.000 ton atau meningkat sebesar 8,5 persen dibandingkan yang telah diproyeksikan pada tahun ini sebanyak 590.000 ton. Berdasarkan kalkulasi perhitungan kebutuhan daging sapi nasional pertahun angkanya mencapai 653 ribu ton tersebut atau setara dengan 3.657.000 ekor sapi pertahun, dimana rata-rata kebutuhan konsumsi masyarakat untuk daging sapi setiap bulan jumlahnya sebesar 305 ribu ekor sapi. Dari jumlah kebutuhan yang besar tersebut, angka produksi dari peternak lokal hanya mampu memenuhi sebesar 406 ribu ton atau setara dengan 2.339.000 ekor sapi (sekitar 64 %).

Ternak bebek potong Indonesia hanya memproduksi 25.800 ton per tahun daging bebek. Pemasaran daging bebek umumnya diperuntukkan bagi warung-warung makan yang menyediakan menu utama bebek, dengan berat karkas satu

kilogram, yang biasanya lebih didominasi oleh bebek afkir. Pada dasarnya peluang potensi pengembangan bebek potong ini sangat menjanjikan dan merupakan peluang usaha bagi peternak dengan pangsa pasar yang potensial. Produksi susu Kambing Peranakan Ettawa, Itik Alabio, Ayam Arab, Sapi Bali, dan Sapi Simbara (*Simental Brahman*) semakin menjanjikan di masa yang akan datang. Pertumbuhan kebutuhan akan komoditas hewan tersebut yang semakin meningkat, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global, sedangkan pada waktu bersamaan produksinya masih di bawah tingkat kebutuhan pasar. Oleh karena itu, usaha produksi ternak Kambing Peranakan Ettawa, Itik Alabio, Ayam Arab, Sapi Bali, dan Sapi Simbara (*Simental Brahman*) perlu program, anggaran dan kebijakan mendukung agar dapat lebih berkembang.

Analisis ekonomi penggemukan kambing potong menunjukkan bahwa dengan pemeliharaan secara intensif memberikan keuntungan Rp.6.276,58/100 ekor/hari atau Rp. 627.66 per ekor per hari. Analisis data menunjukkan bahwa BEP sebesar 0,84 yang berarti usaha penggemukan kambing potong tersebut memberikan keuntungan. Selanjutnya nilai B/C ratio sebesar 1,20 berarti setiap peningkatan biaya sebanyak Rp. 100 akan menghasilkan keuntungan sebanyak Rp. 120. Konsep ini memberi petunjuk bahwa semakin meningkat nisbah B/C semakin menguntungkan usaha tersebut. Sedangkan nilai ROI sebesar 16,46% menyimpulkan bahwa agribisnis penggemukan kambing mempunyai prospek yang cerah dimana dapat menghasilkan usaha setara dengan bunga bank 16,46%.

Potensi untuk mengembangkan ternak kambing di Indonesia sangat terbuka lebar, karena kurang lebih 30 persen kebutuhan pangan dan pertanian dipenuhi oleh ternak, sehingga keberadaan ternak menjadi sangat strategis dalam hidup dan kehidupan manusia. Pengembangan potensi tersebut sebenarnya sangat terbuka lebar, hal ini didukung oleh: (1) Sumber Daya Manusia, seperti Ilmuwan dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, balai-balai penelitian; (2) Kelembagaan yang terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Balai Embrio *Transfer* (BET), Balai Inseminasi Buatan (BIB), dan Satker Dinas Peternakan, Peternak dan Kelompok Peternak domba dan kambing, Organisasi Profesi (HPDKI, PG30), pasar domestik maupun luar negeri; (3) Potensi Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT),

seperti ketersediaan plasma nutfah potensial seperti bibit Kambing Peranakan Ettawa, Kemajuan ilmu pemuliaan (seleksi, *culling*, *replacement*, persilangan, dan rekayasa genetika), Kemajuan industri obat-obatan ternak, dukungan peternakan rakyat dan kelompok peternak dalam produksi bibit sebar dan bibit induk, lahan-lahan pangonan, yang dapat dijadikan basis ekologi peternakan.

Keberhasilan program produksi Kambing Peranakan Ettawa Itik Alabio, Ayam Arab, Sapi Bali, dan Sapi Simbara (*Simental Brahman*) perlu adanya dukungan investasi dalam pengembangan agribisnis dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat/komunitas peternak. Investasi tersebut meliputi aspek: (1) pelayanan kesehatan hewan; (2) dukungan penyediaan bibit (pejantan) unggul dan induk berkualitas; (3) kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan yang terkait dengan aspek pakan dan manajemen pemeliharaan; serta (4) pengembangan kelembagaan untuk mempercepat arus informasi, pemasaran, promosi, permodalan; (5) penyediaan infrastruktur untuk memudahkan arus barang *input-output* serta pemasaran produk; (6) ketersediaan laboratorium kesehatan hewan, pakan, dan reproduksi; serta (7) penyiapan lahan usaha peternakan dan penetapan tata ruang agar pengembangan ternak tidak terganggu oleh masalah kesehatan hewan, sosial, hukum, dan lingkungan.

Secara mandiri swasta dapat bergerak disektor hulu (usaha penyediaan calon induk, penyediaan pejantan, penyediaan semen, pabrik pakan mini, dan lain-lain), serta pada kegiatan hilir (rumah potong hewan, industri pengolahan daging, susu, kulit, kompos, dan lain-lain). Usaha ternak budidaya oleh swasta dilakukan melalui pendekatan pola kemitraan, dimana peternak menghasilkan bakalan dan inti membeli untuk digemukkan atau langsung dipasarkan. Variasi dari pola kemitraan dan investasi dalam pengembangan kambing dan domba sistem integrasi mungkin cukup beragam, dan harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pembangunan peternakan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk peternakan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam dan merata. Sedang swasta dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan

seluas-luasnya dalam mewujudkan kecukupan produk peternakan, dapat berupa melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi produk ternak.

Dukungan kebijakan investasi perlu menyertakan petani sebagai *end user* dan pada akhirnya memberikan titik terang dalam pemberdayaan petani, peningkatan kesejahteraan di samping penambahan devisa dari ekspor bila pasar ekspor ke negara-negara jiran dapat dimanfaatkan. Untuk mendukung pembangunan/revitalisasi pertanian dan menciptakan iklim investasi guna pengembangan dan peningkatan mutu ternak diperlukan berbagai kebijakan, antara lain: (a) penyederhanaan prosedur dan persyaratan untuk investasi usaha pengembangan peternakan kambing; (b) penyediaan kredit bagi hasil dan (c) penyediaan informasi (harga dan teknologi).

Pembangunan peternakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya lokal. Pembangunan peternakan mengarahkan meningkatkan daya saing dan berkelanjutan serta membangun sistem peternakan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan terhadap produk peternakan dan mensejahterakan peternak. Oleh karena itu program pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit ternak, mengembangkan usaha budidaya dalam rangka meningkatkan populasi, produktivitas dan produksi ternak, meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan, meningkatkan jaminan keamanan pangan hewani yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) dan meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat peternakan.

Selama ini program pembangunan peternakan tidak membuat perbedaan antara ternak sumberdaya, ternak komoditas dan ternak produk. Indonesia telah menghasilkan ribuan ton daging yang hampir seluruhnya berasal dari pemotongan ternak sumberdaya. Artinya kita mengkonsumsi plasma nutfah yang seharusnya dirawat. Sementara ternak yang diimpor adalah ternak komoditas dan ternak produk, sehingga Indonesia tidak memperoleh manfaat lebih dari impor ternak produk tersebut. Pada sisi lain Indonesia mengeksport ternak hidup dari kelompok ternak sumberdaya, sehingga suatu hari nanti, ternak sumberdaya Indonesia telah pindah ke negara lain. Kurang optimal pengadaan dan penyediaan bibit ternak serta

hijauan makanan ternak dalam rangka memperbaiki mutu ternak dan mutu hijauan makanan ternak merupakan masalah yang perlu adanya penyelesaiannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak telah berlaku sejak tanggal 2 Desember 2011. Dengan peraturan ini yang merupakan salah satu pelaksanaan amanah Undang Undang No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah telah berkomitmen membangun perbibitan ternak secara nasional dengan arah yang sudah disepakati sebagaimana diatur dalam PP tersebut. Membangun perbibitan ternak harus dimulai dengan menyusun kebijakan pemerintah tentang perbibitan ternak. Dengan lahirnya PP No. 48 tahun 2011 tersebut, berarti kebijakan perbibitan ternak secara nasional (*national animal breeding policy*) belum dimiliki.

Kebijakan dalam pembibitan ternak dituangkan dalam visi dan misi pengembangan industri benih dan bibit di Indonesia. Visi pembibitan peternakan adalah tersedianya berbagai jenis ternak dalam jumlah dan mutu yang memadai serta mudah diperoleh, adapun misinya adalah

- 1) Menyediakan bibit yang berkualitas dalam jumlah cukup,
- 2) Mengurangi ketergantungan impor bibit ternak,
- 3) Melestarikan dan memanfaatkan bangsa ternak lokal,
- 4) Mendorong pembibitan-pembibitan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Selanjutnya untuk mencapai misi di atas dilakukan melalui strategi pengembangan industri benih dan bibit di Indonesia yaitu:

- a. Strategi pengembangan perusahaan benih/bibit dan SDM,
- b. Strategi pengembangan teknologi benih/bibit unggul,
- c. Strategi pengembangan kelembagaan pembibitan

Bibit merupakan modal awal dari proses budidaya, oleh karena itu diperlukan bibit berkualitas dalam jumlah yang cukup memadai, mudah diperoleh dan terjamin kontinuitasnya. Pengadaan bibit umumnya masih merupakan hasil swadaya peternaknya sendiri. Usaha pemerintah dalam penyediaan bibit berkualitas melalui perbaikan mutu genetik domba Priangan telah banyak dilakukan baik melalui persilangan dengan domba impor maupun seleksi yang dilakukan di balai

pembibitan, namun hasilnya belum memuaskan. Pola pemuliaan yang tepat dan berkelanjutan belum ada, kebijakan yang dilakukan umumnya bersifat *top down*, hampir tidak pernah memperhatikan aspirasi dan kemampuan peternak.

Salah satu program investasi penyediaan bibit unggul, untuk calon induk maupun pejantan adalah sangat strategis, karena saat ini praktis belum ada pihak yang tertarik. Pusat pembibitan ternak milik pemerintah yang sudah ada belum mampu merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat. Namun ke depan kegiatan ini justru harus dilakukan oleh swasta atau peternak kecil yang maju. Investasi untuk usaha ini dapat dimulai dengan skala sedang 200-500 ekor untuk kemudian dikembangkan menjadi usaha yang besar. Investasi yang diperlukan usaha ini sedikitnya sekitar Rp. 0,5-1 milyar, tidak termasuk kebutuhan lahan.

Investasi mendukung perbibitan ternak dan mewujudkan harapan masyarakat agar ketersediaan bibit unggul ternak tingkat lokal. Kesulitan peternak adalah mendapatkan bibit unggul di beberapa daerah, sehingga harus mendatangkan bibit dari daerah lain yang jaraknya relatif lebih jauh. Untuk itulah peran BPTU-HPT Pelaihari sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kebutuhan pengadaan bibit itik secara memadai. Lebih jauh, BPTU-HPT Pelaihari dapat diarahkan sebagai sentra pengembangan bibit unggul ternak itik yang terkemuka secara nasional. Hingga saat ini, BPTU-HPT Pelaihari telah melayani hampir seluruh Provinsi di Indonesia. Adapun Provinsi yang sudah menjadi daerah penyebaran bibit BPTU-HPT Pelaihari antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jambi, dan Lampung.

Pembangunan peternakan yang terarah, terprogram sebagai acuan pelaksanaan visi misi kementerian pertanian perlu adanya rencana strategis yang diterjemahkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah dan mengacu visi dan misi Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sehingga perlu penyusunan rencana strategis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak (BPT-HMT) Pelaihari. Rencana strategis mengacu kepada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 bidang peternakan dan pengembangan teknologi.

1.2 Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanian dan Pengembangan Teknologi.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional bidang pertanian dan pengembangan teknologi menekankan adanya kedaulatan pangan, kemandirian berlandaskan gotong royong. Mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: *"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"*. Mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Prioritas pembangunan menuju perubahan Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Sasaran pembangunan ilmu pengetahuan teknologi (iptek) adalah meningkatnya kapasitas iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung:
 - a. Daya saing sektor produksi barang dan jasa;
 - b. Keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
 - c. Penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
2. Meningkatnya ketersediaan faktor input bagi penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup sumberdaya manusia, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan, dan pembiayaannya.

Arah kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi, maka pembangunan diarahkan pada: Penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian; (2) energi, energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (7) material maju.

1.3 Arah Kebijakan dalam Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan

a. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi pembangunan nasional sebagai acuan Kementerian/Lembaga, yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Memperhatikan visi tersebut, mempertimbangkan masalah dan tantangan dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"

Sesuai tugas pokok dan fungsinya dan mewujudkan visi Kementerian Pertanian mengemban misi, yaitu:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian menyebutkan tujuan pembangunan pertanian Indonesia tahun 2015-2019, sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian juga disebutkan sasaran strategis pembangunan pertanian Indonesia tahun 2015-2019. Sasaran strategis merupakan

indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Swasembada padi, jagung, kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

b. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis Kementerian Pertanian periode 2015-2019, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyusun visi, misi, tujuan, sasaran strategis: Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut :

"Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak".

Selanjutnya untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maka telah dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan daya saing produksi dan produk peternakan dengan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan: perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak.
3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas penyelenggaraan administrasi publik

Bersinergi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam periode tahun 2015-2019, adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal, dalam rangka:

1. Meningkatkan produksi ternak dan produk Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berdaya saing.
2. Mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.
3. Menyediakan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Sasaran utama program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah memfasilitasi meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani, meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak dan tersedianya daging sapi/kerbau domestik sebesar minimal 90 persen dari total kebutuhan nasional. Secara lebih rinci, sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

1. Penerbitan kebijakan dan NSPK di bidang: perbibitan; budidaya ternak; pakan ternak; pelayanan kesehatan hewan; pelayanan kesmavet dan pascapanen; serta pelayanan publik.
2. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
3. Tercapainya produksi ternak dengan pemanfaatan sumber daya lokal;
4. Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal;
5. Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis;
6. Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan;
7. Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis.

1.4. Pengertian

Pengertian Renstra sesuai PP 108/2000 adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah. Rencana Strategik (Renstra) sebagai tolok ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian dalam pertanggungjawaban kepala instansi pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan.

1.5. Landasan Hukum

BPTU-HPT Pelaihari sebagai UPT kementerian pertanian yang berada di daerah, maka dalam perumusan dan penyusunan Renstra tidak terlepas dari tanggung jawab untuk mendukung pembangunan di daerah. Keperluan dokumen perencanaan tingkat pusat, dan tingkat daerah serta peraturan-peraturan atau dokumen perencanaan dan produk hukum lainnya yang berlaku di daerah sebagai landasan hukumnya dalam penyusunan renstra ini.

1.6. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibentuknya BPTU-HPT Pelaihari adalah menjalankan fungsi utama sebagai berikut:

1. Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
3. Pelaksanaan uji *performance* dan uji *zuriat* ternak unggul;
4. Pelaksanaan *recording* pembibitan ternak unggul;
5. Pelaksanaan pelestarian plasma nuftah;
6. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul;
7. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
8. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
9. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;
10. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
11. Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak;

12. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak;
13. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul;
14. Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul;
15. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; dan
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.

BAB II

KONDISI UMUM BPTU-HPT PELAIHARI

2.1 Sejarah BPTU-HPT Pelaihari

Awalnya berdiri balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari bernama Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing Domba dan Itik Pelaihari, yang juga perubahan nama dari Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak (BPT-HMT) Pelaihari. Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 313/KPTS/Org/1978 tanggal 25 Mei 1978, BPT-HMT Pelaihari mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak, dengan wilayah pelayanan mencakup Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. BPT-HMT Pelaihari memelihara Kambing Peranakan Ettawa, Itik Alabio, Ayam Arab, Sapi Bali, dan Sapi Simbara (*Simental Brahman*). BPT-HMT Pelaihari mempunyai tugas pokok dalam pengadaan dan penyediaan bibit ternak serta hijauan makanan ternak dalam rangka memperbaiki mutu ternak dan mutu hijauan makanan ternak.

Pada tanggal 16 April 2002 Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Nomor: 283/KPTS/OT.210/2002 yang semula bernama Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Pelaihari diubah menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik (BPTU KDI) Pelaihari dengan wilayah kerja Nasional. Tugas pokok BPTU KDI adalah melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit kambing, domba dan itik unggul.

Pada tanggal 24 Mei 2013 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak yang memutuskan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat BPTU-HPT adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Direktur Pakan Ternak.

2.2 Visi dan Misi BPTU-HPT Pelaihari

Mempertimbangkan dan mewujudkan RPJMN 2005-2025 dan renstra Kementerian Pertanian, serta visi, misi, tugas dan fungsi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan BPTU-HPT Pelaihari memiliki visi yaitu sebagai :

"Pendorong ketersediaan bibit kambing, itik dan sapi madura unggul berskala nasional"

Mewujudkan visi tersebut BPTU-HPT Pelaihari memiliki misi sebagai berikut:

1. Melakukan pemuliaan ternak kambing, itik dan sapi madura;
2. Meningkatkan produksi dan penyebaran bibit kambing, itik dan sapi madura unggul secara berkesinambungan;
3. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat peternak; dan
4. Menjalankan institusi dengan tata kelola yang baik.

Selanjutnya BPTU-HPT Pelaihari dalam mewujudkan visi dan misi tersebut menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas plasma nuftah;
- b) Mempertahankan dan meningkatkan produktifitas ternak kambing, itik dan sapi madura;
- c) Meningkatkan penyebaran bibit unggul;
- d) Mengembangkan pembibitan ternak kambing, itik dan sapi madura di masyarakat;
- e) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- f) Mengembangkan pembinaan kepada masyarakat;
- g) Meningkatkan kapasitas SDM; dan
- h) Meningkatkan sarana dan prasarana.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai BPTU-HPT Pelaihari antara lain:

- a) Meningkatkan kemurnian ternak kambing, itik dan sapi madura secara terprogram dan berkesinambungan;
- b) Meningkatkan jumlah bibit yang didistribusi;
- c) Meningkatkan pembibit guna memenuhi kebutuhan bibit di masyarakat;
- d) Meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat;
- e) Meningkatkan jumlah pembibit/kawasan yang terbina;

- f) Meningkatkan kinerja aparatur;
- g) Meningkatnya fasilitas UPT; dan
- h) Terpeliharanya fasilitas UPT.

2.3 Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi

Mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian pada 24 Mei 2013 Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak yang dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat BPTU-HPT adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Direktur Pakan Ternak. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa BPTU-HPT mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

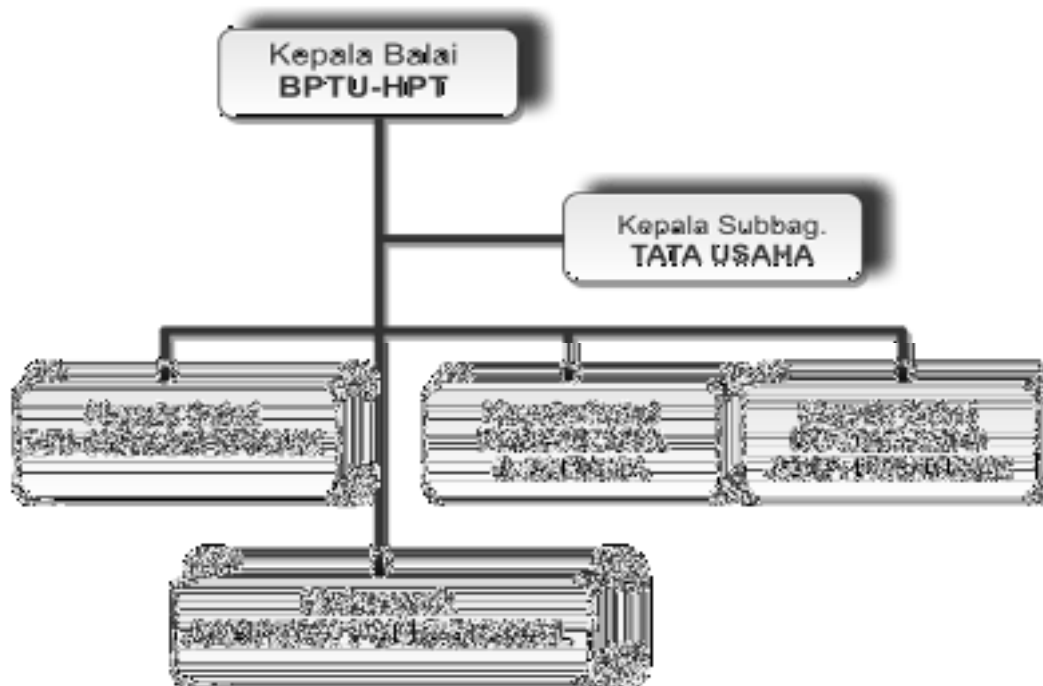
Selanjutnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa BPTU-HPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemeliharaan bibit ternak unggul;
3. Pelaksanaan uji *performance* dan uji *zuriat* ternak unggul;
4. Pelaksanaan *recording* pembibitan ternak unggul;
5. Pelaksanaan pelestarian plasma nuftah;
6. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul;
7. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
8. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
9. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;

10. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
11. Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak;
12. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul;
13. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul;
14. Memberikan pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul;
15. Pengelolaan sarana dan sarana teknis; dan
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.

BPTU-HPT Pelaihari telah melakukan tugas dan fungsi utama sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1-3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak tanggal 24 Mei 2013. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa BPTU-HPT harus memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- a) Kepala;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Seksi Pelayanan Teknis;
- d) Seksi Prasarana dan Sarana Teknis;
- e) Seksi Informasi dan Jasa Produksi;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT BPTU – HPT Pelaihari

BPTU HPT Pelaihari telah memiliki susunan organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak tanggal 24 Mei 2013. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa tiap-tiap subbagian dan seksi memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti:

- a) Subbagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.
- b) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul yang meliputi pemeliharaan dan pengawasan kesehatan hewan, penyediaan pakan ternak, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul, serta pengelolaan unit pembenihan/pembibitan, pemeliharaan, produksi, dan pengembangan hijauan pakan ternak.

- c) Seksi Prasarana dan Sarana Teknis mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana teknis meliputi instalasi kandang bibit ternak unggul, kebun bibit hijauan pakan ternak, ladang penggembalaan, sarana teknis dan sarana pendukung.
- d) Seksi dan Informasi Jasa Produksi mempunyai tugas melakukan pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul dan hijauan pakan ternak.

Subbagian dan Seksi-Seksi pada BPTU-HPT Pelaihari telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak tanggal 24 Mei 2013. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti:
 - b) Melaksanakan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
 - c) Melaksanakan uji *performance* dan uji *zuriat* ternak unggul;
 - d) Melaksanakan *recording* pembibitan ternak unggul;
 - e) Melaksanakan pelestarian plasma nutfah
 - f) Melaksanakan pengembangan bibit ternak unggul;
 - g) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
 - h) Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti:
 - a) Melaksanakan pembibitan hijauan pakan ternak;
 - b) Melakukan pengaawasan mutu pakan ternak;

- c) Melakukan pengelolaan pakan ternak;
 - d) Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti:
- a) Melaksanakan pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - b) Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil *Indepth Interview*, Kelompok Jabatan Fungsional pada BPTU-HPT Pelaihari telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak tanggal 24 Mei 2013.

Pada pasal 18 ayat (5) dijelaskan bahwa Lokasi BPTU-HPT Pelaihari berada di Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jenis ternak kambing, itik dan Sapi Madura. Berdasarkan hasil kajian di lokasi BPTU-HPT Pelaihari telah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak tanggal 24 Mei 2013. Akan tetapi, jenis ternak yang ada saat ini baru kambing dan itik saja. Sapi Madura baru direncanakan masuk ke BPTU-HPT Pelaihari pada tahun ini sebanyak 20 ekor.

2.4 Program Utama BPTU-HPT Pelaihari

BPTU-HPT Pelaihari memiliki beberapa program kegiatan utama, yaitu:

- 1) Optimalisasi Pembibitan *on Farm*:
 - a) Pemeliharaan, produksi dan pemuliaan ternak;
 - b) Pemurnian ternak kambing, itik (penggaluran ternak itik) dan sapi madura.
- 2) Pengembangan Pembibitan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura di masyarakat:
 - a) Pengembangan pembibitan ternak kambing, itik dan sapi madura;

- b) Monitoring dan pembinaan kawasan pembibitan ternak kambing, itik dan sapi madura.
- 3) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak
- 4) Penguatan Kelembagaan:
 - a) Peningkatan kualitas SDM;
 - b) Peningkatan kualitas pelayanan;
 - c) Meningkatkan promosi dan publikasi;
 - d) Peningkatan fasilitas UPT;
 - e) Operasional pemeliharaan fasilitas UPT.

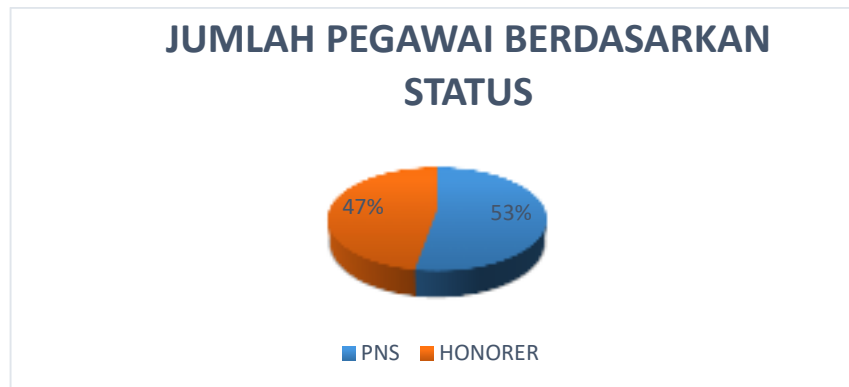
2.5 Wilayah Pelayanan

Hingga saat ini, BPTU-HPT Pelaihari telah melayani hampir seluruh Provinsi di Indonesia. Adapun Provinsi yang sudah menjadi daerah penyebaran bibit BPTU-HPT Pelaihari antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jambi, dan Lampung.

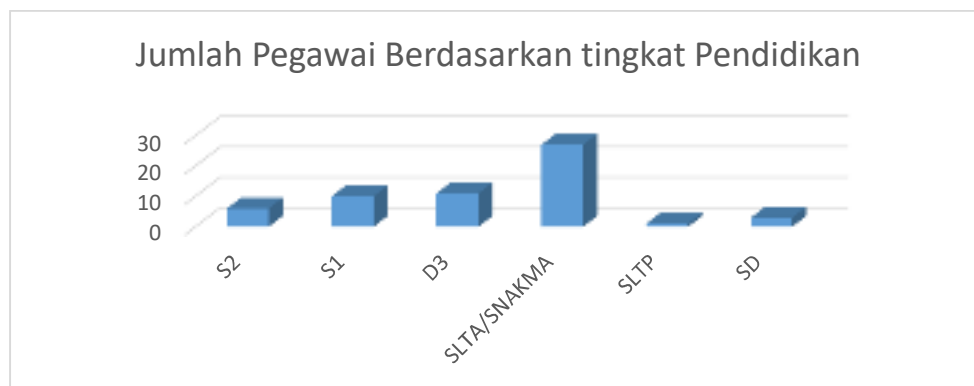
2.6 Potensi BPTU-HPT Pelaihari

b. Potensi Sumber daya manusia

Jumlah pegawai BPTU-HPT Pelaihari yang berstatus PNS berjumlah 53% sedangkan pegawai Honorer berjumlah 47%. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebaran pegawai BPTU-HPT Pelaihari mayoritas berpendidikan SLTA/SNAKMA sejumlah 27 orang. Sedangkan tingkat pendidikan yang paling tinggi yaitu Strata 2 (S2) berjumlah 6 orang. Dalam rangka menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi SDM telah dilakukan berbagai pelatihan dan *workshop* bagi personel BPTU-HPT Pelaihari baik pelatihan yang bersifat teknis untuk kelompok jabatan fungsional maupun pelatihan administratif untuk staf administrasi. Guna mengevaluasi kinerja pegawai, maka pada awal tahun dibuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi pada akhir tahun.



Gambar 2.2. Jumlah pegawai berdasarkan status



Gambar 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

a. Potensi Sarana Prasarana

BPTU-HPT Pelaihari memiliki potensi lahan yang masih sangat luas. Lahan seluas 81.3 Ha dimanfaatkan untuk perkantoran, Farm dan Lahan HPT. Sementara itu, masih ada sekitar ± 620 Ha lahan milik Ditjen Peternakan yang belum termanfaatkan karena masih bersengketa dengan Perusahaan dan Rakyat sekitar. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi balai, BPTU-HPT dilengkapi dengan sejumlah peralatan kantor, mesin penetasan, sarana transportasi, kandang ternak, gudang, dan fasilitas lainnya. Sarana dan Prasarana yang dimiliki BPTU-HPT Pelaihari saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1. Potensi Lahan BPTU-HPT Pelaihari

No	Luas Lahan (Ha)	Pemanfaatan	Keterangan
1	81,3	Untuk Perkantoran, Farm, dan Lahan HPT	Lahan milik Pemda Prov. Kalimantan Selatan
2	92,36	Belum termanfaatkan (eks. ADB)	Lahan milik Ditjen Peternakan (Sengketa dengan Perusahaan dan masyarakat)
3	540,60	2 Ha tertanami gamal namun dicabuti oleh oknum. 538,60 Ha belum termanfaatkan (Eks. ADB)	Lahan milik Ditjen Peternakan (Sengketa dengan Perusahaan dan masyarakat)

Tabel 2.2. Kendaraan dan Mesin penunjang pada BPTU-HPT Pelaihari 2014

No	Uraian	Jumlah (unit)	Tahun Pengadaan	Keterangan
1	Kendaraan R-6	3	2003 dan 2005	1 baik, 2 rusak ringan
2	Kendaraan R-4 (truk)	3	2002	1 baik, 2 rusak ringan
3	Kendaraan R-4 (Colt L-300)	1	2001	1 rusak ringan
4	Kendaraan R-4 (Station)	3	2001, 2002, dan 2011	2 baik, 1 rusak ringan
5	Kendaraan R-2	16	1994, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, dan 2005	12 baik, 4 rusak berat
6	Kendaraan R-3	5	2005, 2013, 2014	3 baik, 2 rusak berat
7	Traktor	3	2001, 2004 dan 2013	1 baik, 2 rusak berat
8	Mixer	2	2000	1 rusak ringan, 1 rusak berat
9	Genset	5	1979, 1996, 2004, 2006, dan 2011	3 baik, 2 rusak berat
10	Mesin Setter	11	2004 dan 2013	8 baik, 3 rusak berat
11	Mesin Hatchery	4	2004 dan 2012	2 baik, 2 rusak ringan

Tabel 2.3. Sarana Gedung dan Kandang pada BPTU-HPT Pelaihari

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Luas (M ²)	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	415	Jumlah PNS 48 Orang
2	Kandang itik	29	6014	Kapasitas Layer 9000 ekor
3	Kandang Kambing	5	2375	Kapasitas Kandang 450 ekor
4	Kandang Sapi	1	120	Kapasitas 20 ekor
5	Penetasan	5	502	Kapasitas mesin setter 11 unit dan hatchery 4 unit
6	Gudang, Biosecurity, Laboratorium, Pos Jaga, dll	15	553	Fasilitas pendukung kegiatan
7	Tempat Parkir, Garasi	5	412	Fasilitas pendukung kegiatan
8	Rumah Dinas	10	538	Penggunaan untuk karyawan

b. Jaminan Mutu

Kriteria proses manajemen bertujuan untuk mengukur bagaimana organisasi mendesign dan mengelola proses kerja utama. Pada kegiatan administrasi, dokumen mutu BPTU-HPT Pelaihari sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Untuk lebih jelas mengenai proses manajemen pada BPTU-HPT Pelaihari dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Proses Manajemen Mutu BPTU-HPT Pelaihari

No	Perihal	Penerapan	Keterangan
Administrasi			
1	Dokumen Mutu	ISO 9001:2008	Telah tersedia untuk semua bagian. Hanya kegiatan mengurus perpustakaan baik online maupun offline yang belum distandarkan pada ISO 9001:2008. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dievaluasi setahun sekali
2	Tarif Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Sesuai dengan PP No 48 Tahun 2012	Sesuai PP 48/2012 dan sekarang sedang dalam tahap pengajuan revisi. Tarif bibit ternak dan HPT telah disosialisasikan kepada

			pelanggan.
3	Pelaksanaan pembimbingan, monitoring dan evaluasi Kawasan Sumber Bibit	Dilaksanakan sesuai target	Melakukan pemberian bimbingan teknis kepada pembibit yang telah terbentuk tentang teknis produksi, pemeliharaan, pemasaran bibit dan segala hal yang terkait dengan pembibitan itik kepada 32 kelompok binaan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sarana dan Prasarana			
1	Area Kerja	Tercukupi	- Sedang mengusulkan penambahan gedung di tahun 2016, untuk penambahan pelayanan kepada masyarakat. Gedung ini juga bisa difungsikan untuk perpustakaan dan untuk kegiatan bimbingan teknis peternak yang datang ke BPTU-HPT Pelaihari. - Lahan masih ada yang bersengketa dengan perusahaan dan masyarakat.
2	Peralatan	Peralatan Dasar	Peralatan dasar sudah tersedia namun masih dirasa kurang jumlahnya
3	Bahan-bahan	Pengadaan bahan	Belum tercukupi, masih banyak bahan yang belum dikirim dari produsen, seperti konsentrat.

Standar Pelayanan Teknis Minimal BPTU-HPT Pelaihari memiliki indikator atau parameter dan standar terkait proses tatalaksana produksi dan distribusi bibit ternak serta hijauan pakan ternak. Di dalam pencapaiannya aspeknya meliputi:

1. Aspek Mutu Produksi ternak dan HPT, yaitu standar prosedur ternak seperti itik, kambing meliputi kesesuaian bobot, kesehatan hewan, serta produksi ternak itu sendiri sedangkan untuk hijauan pakan ternak meliputi kualitas hijauan dan kandungan gizi hijauan.
2. Aspek Ketepatan waktu, yaitu standar prosedur yang harus dipenuhi oleh BPTU-HPT Pelaihari sebagai bagian dari janji kepada pelanggan. Tepat dari sisi waktu dan terjamin dari sisi kualitas produk. Untuk menjamin kepastian tersebut, BPTU-HPT Pelaihari harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. BPTU-HPT Pelaihari juga memiliki mekanisme antisipasi berupa jalan keluar untuk menghadapi keadaan dimana terjadi penumpukan pemesanan bibit ternak unggul oleh pelanggan.
3. Aspek Tarif Bibit Ternak Unggul yang terjangkau oleh pengguna, yaitu standar harga yang wajar dalam arti cukup ekonomis serta terjangkau oleh pengguna. Sejauh ini penetapan harga oleh BPTU-HPT Pelaihari sudah cukup wajar mengingat lembaga ini adalah lembaga pemerintah yang bukan ditujukan untuk mencari untung tetapi lebih kepada pelayanan masyarakat.
4. Aspek Keterbukaan Informasi dan Teknologi, yaitu aspek kelayakan umum pelayanan masyarakat yang telah menjadi standar umum yang ditetapkan pemerintah yaitu transparansi publik. Transparansi ini memungkinkan pelanggan atau pengguna jasa BPTU-HPT Pelaihari bisa menerima informasi se jelas mungkin tentang bentuk layanan BPTU-HPT Pelaihari, kualitas layanannya, jenis layanannya, harganya dan termasuk informasi terkait penjelasan ketika terjadi keterlambatan pada proses pemenuhan pesanan pelanggan.

2.6 Capaian kinerja periode 2009-2014

a. Hijauan Pakan Ternak

Realisasi yang tercapai tahun 2014 adalah luasan lahan rumput kinggrass yang tertanami seluas 30.7 ha dan luasan gamal yang tertanami adalah 22.6 ha. Dengan demikian maka jumlah total lahan yang tertanami sebanyak 53.30 ha atau

106.59% dari target kinerja yang ditetapkan seluas 50 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak TA. 2014

No	Jenis Hijauan	Target	Realisasi	%
*	<i>Pengembangan HPT</i>			
1	Pengembangan Rumput King Gress	20	20.6	100
2	Pengembangan Gamal	30	30.7	100
3	Pengembangan Gamal di Ex ADB	-	2	-
Jumlah		50	53.30	106.59

b. Produksi Bibit Itik (DOD)

Produksi bibit itik (DOD) Tahun Anggaran 2014 mencapai 240.299 ekor dari target 260.000 ekor atau mencapai 91.44% dari target yang ditetapkan. Adanya kasus Avian Influenza di masyarakat pada awal tahun 2014 yang berdampak pada terhentinya produksi bibit ternak itik mempengaruhi pencapaian target produksi. Produksi bibit itik (DOD) tahun anggaran 2014 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6. Produksi Bibit Itik (DOD) di BPTU-HPT Pelaihari TA. 2014

BULAN	JUMLAH (EKOR)									Jumlah
	Alabio			Mojosari			MA			
	JTN	BTN	JMLH	JTN	BTN	JMLH	JTN	BTN	JMLH	
Jan	8823	8820	17643	5048	3184	8232	513	468	981	26856
Feb	6195	6329	12524	2350	2403	4753	383	393	776	18053
Mar	6468	6737	13205	2163	2363	4526	391	420	811	18542
Apr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	11208	12381	23589	4374	4784	9158	0	0	0	32747
Jun	7379	8057	15436	2683	2689	5372	0	0	0	20808
Jul	4825	5322	10147	1668	1750	3418	0	0	0	13565
Aug	3525	3822	7347	1579	1704	3283	0	0	0	10630
Sep	5583	6187	11770	3946	3935	7881	0	0	0	19651
Okt	6422	6815	13237	4385	4487	8872	0	0	0	22109
Nov	6051	6015	12065	4090	4291	8381	0	0	0	20446
Dec	12327	12507	24833	6047	6012	12058	0	0	0	36892
Jumlah	78806	82992	161797	38333	37602	75934	1287	1281	2568	240299

c. Produksi Bibit Kambing

Untuk produksi bibit kambing di BPTU-HPT Pelaihari Jumlah kelahiran selama tahun 2014 adalah 246 ekor dari target 158 ekor atau 155.70%. Sedangkan produksi bibit 108 ekor dari target 79 ekor atau 136.71%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Produksi Bibit Ternak Kambing PE 2014

Uraian	Bulan												Total Produksi
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
Jantan	-	-	-	-	-	23	-	15	-	2	3	10	53
Betina	-	-	-	-	-	20	-	2	5	17	5	6	55
Jumlah	-	-	-	-	-	43	-	17	5	19	8	16	108

Capaian produksi dan distribusi bibit ternak kambing PE pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Capaian produksi dan distribusi bibit ternak kambing PE

Uraian	Target	Realisasi							
		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Jml (Ekor)	Ekor	%	Ekor	%	Ekor	%	Ekor	%
Capaian Produksi Bibit Kambing PE	79	-	-	43	54.43	65	82.28	108	136.71
Capaian Distribusi Bibit Kambing PE	40	-	-	-	-	13	32.50	40	100.00

d. Pemesanan Ternak

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPTU-HPT Pelaihari memiliki wilayah kerja seluruh Indonesia. Kegiatan penyebaran distribusi dan pemasaran telah memiliki jaringan ke beberapa daerah di Indonesia terutama untuk ternak itik. Keterbatasan populasi sebagai akibat dari keterbatasan anggaran menyebabkan belum semua pesanan dapat

terlayani. Pemesanan ternak pada TA. 2012- 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9. Pemesanan Ternak Kambing dan Itik (Bibit dan Non Bibit) TA. 2012, 2013 dan 2014

No	Tahun	Komoditas	Pemesanan (ekor)	Terealisasi (ekor)	Persentase Realisasi
1	2012	Ternak Itik	150,235	75,354	50.16
		Ternak Kambing	215	97	45.12
2	2013	Ternak Itik	291,635	241,286	82.74
		Ternak Kambing	348	74	21.26
3	2014	Ternak Itik	480,320	221,917	46.20
		Ternak Kambing	390	60	15.38

e. Kegiatan Pembimbingan

Keterbatasan sumber daya yang ada BPTU-HPT, menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan bibit kambing dan itik di seluruh Indonesia. BPTU-HPT Pelaihari kemudian menerapkan strategi dengan melakukan pembibitan *outfarm* ternak kambing dan itik di kawasan sumber bibit potensial. Kawasan potensial sumber bibit didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan bibit di kawasan itu, dan tahapan selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan bibit kawasan lain.

Pembimbingan diartikan sebagai pemberian bimbingan teknis kepada pembibit yang telah terbentuk tentang teknis produksi, pemeliharaan, pemasaran bibit dan segala hal yang terkait dengan pembibitan itik. Pembimbingan dapat dilaksanakan melalui lisan via telepon, tertulis via email, surat, dan faksimile maupun pembimbingan langsung ke lapangan. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Pembimbingan Kawasan Sumber Bibit TA. 2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Kelompok Binaan (kelompok/Pembibit)	32	32	100.00

2. Realisasi Anggaran Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

a. Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2014

Belanja pegawai merupakan pengeluaran belanja Balai yang dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari. Adapun realisasi pengeluaran untuk belanja pegawai adalah Rp.3.113.700.453,-atau 94,00% dari pagu anggaran sebesar Rp.3.312.272.000,- setelah revisi penghematan.

Belanja Barang merupakan belanja berupa barang/jasa untuk mendukung kegiatan operasional Balai. Jumlah pengeluaran yang terealisasi untuk Belanja Barang adalah sejumlah Rp.8.407.532.810,-atau 79,11% dari pagu anggaran sebesar Rp.10.627.936.000,- setelah revisi penghematan.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Realisasi Belanja Modal pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak adalah sejumlah Rp.4.787.235.650,- atau 90,74% dari pagu anggaran sebesar Rp.5.275.958.000,-setelah revisi penghematan. Secara keseluruhan, realisasi anggaran tahun 2014 pada BPTU HPT Pelaihari sebesar Rp. 16.308.468.913 atau 84.87% dari total pagu anggaran sebesar Rp 19.216.166.000.

Tabel 2.11. Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2014

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	Rp 3,312,272,000	Rp 3,113,700,453	94.00
2	Belanja Barang	Rp 10,627,936,000	Rp 8,407,532,810	79.11
3	Belanja Modal	Rp 5,275,958,000	Rp 4,787,235,650	90.74
	Jumlah	Rp 19,216,166,000	Rp 16,308,468,913	84.87

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPTU-HPT Pelaihari pada Tahun Anggaran 2014 dengan target sebesar Rp.1.100.000.000,-. Tercapai realisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.1.868.964.000,- atau sebesar 169.90 % dari target yang ditetapkan senilai Rp.1.100.000.000,-. Adapun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12. Realisasi PNBP di BPTU-HPT Pelaihari Tahun Anggaran 2014

No	Jenis Pendapatan	Target 2014		Realisasi 2014	
		Rp	%	Rp	%
1	Penerimaan Fungsional (Penjualan Ternak Kambing, Penjualan Telur dan Ternak Itik)	1.100.000.000	100	1.868.964.000	169.90%

2.5 Analisis SWOT

1. Optimalisasi Pembibitan *on Farm*:

a. Pemeliharaan, Produksi dan Pemuliaan

Kekuatan

1. Tersedianya bibit unggul ternak
2. Adanya SOP pemeliharaan ternak, SOP pakan, SOP produksi dan SOP Pemuliaan ternak.
3. Tersedianya bahan baku pakan.
4. Tersedianya lahan yang cukup luas.
5. Tersedianya sarana dan prsarana.
6. SDM tersedia cukup dalam jumlah dan kualitas.
7. Tersedianya program kerja.
8. Sebagai pusat Ettawa, itik Alabio, ayam Arab, sapi Bali, dan sapi Simbara (*Simental Brahman*) Unggul secara Nasional.
9. Tersedianya struktur organisasi pemeliharaan

Kelemahan

1. Pelaksanaan SOP pemeliharaan, produksi, pemuliaan belum optimal.
2. Kuantitas dan kualitas bahan pakan yang tersedia tidak stabil.

3. Adanya endemik penyakit tertentu.
4. Belum optimalnya pengelolaan lahan yang tersedia.
5. Adanya perubahan iklim.
6. Belum optimalnya perawatan sarana dan prasarana.
7. Penempatan SDM belum sesuai bidangnya.
8. Adanya Sengketa lahan antara BPTU-HPT dengan masyarakat
9. Belum dilaksanakannya struktur dan program kerja secara optimal.

Peluang

1. Adanya Teknologi baru
2. Budaya beternak oleh masyarakat cukup tinggi
3. Peningkatan standar mutu ternak oleh konsumen.
4. Adanya dukungan dari Intansi lain (berdirinya pabrik-pabrik pakan dll)

Ancaman

1. Masuknya penyakit hewan menular.
2. Terdapat iklim yang tidak menentu.
3. Gangguan predator.
4. Minimnya anggaran.
5. Rusaknya plasma nutfah.
6. Diakuinya plasma nutfah oleh negara lain.

b. Pemurnian ternak kambing, itik (penggaluran ternak itik) dan sapi madura.

Kekuatan

1. Tersedianya SDM.
2. Tersedianya sarana dan prasarana.
3. Adanya SOP pemurnian ternak.
4. Adanya program perkawinan ternak.
5. Tersedianya materi ternak.
6. Adanya anggaran pemurnian ternak

Kelemahan

1. Bakalan ternak yang dikawinakan kategori tua
2. Perkawinan pada kambing masih dilakukan secara alami.
3. Belum treatment seperti suhu, tempat dalam mendukung perkawinan
4. Masih rendahnya hasil sinkronisasi birahi.
5. Sulitnya aplikasi teknologi perkawinan.
6. Tidak adanya kesempatan diklat teknologi perkawinan.
7. Masih terjadinya *in breeding*.
8. Terputusnya silsilah ternak.
9. Belum dilakukan pemeriksaan selama kebuntingan.

10. Penurunan mutu bibit.
11. Tidak tersedianya mobil operasional.
12. Dukungan anggaran masih rendah.
13. Belum adanya rekomendasi final dari kegiatan pemuliaan.
14. Minimnya kesempatan pembinaan kepada masyarakat.
15. Panjangnya jalur birokrasi.
16. Kurangnya dukungan hasil penelitian spesifik lokasi

Peluang

1. Permintaan bibit hasil perkawinan sangat tinggi.
2. Perbaikan mutu genetik dengan memasukkan bibit baru.
3. Tercapainya produk tinggi dan hasil perkawinan.
4. Mendukung program swasembada daging nasional.
5. Pembentukan Breed.

Ancaman

1. Adanya gangguan penyakit reproduksi.
2. Terjadinya *In breeding*.
3. Adanya perubahan iklim yang mengganggu program perkawinan.

2. Pengembangan Perbibitan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura di masyarakat:

Kekuatan

1. Tersedianya kelompok ternak siap bekerjasama.
2. Tersedianya sarana dan prasarana.
3. Adanya SOP kerjasama pengembangan bibit ternak.
4. Adanya petugas mendukung program.
5. Adanya dukungan pemerintah daerah
6. Adanya anggaran pemurnian ternak

Kelemahan

1. Belum ada pengetahuan dan pengalaman yang cukup.
2. Belum ada kontrol manajemen pemeliharaan dan pengembangan berbasis masyarakat
3. Belum ada standar sarana prasarana sesuai dengan ISO.
4. Monitoring evaluasi belum optimal
5. Butuh waktu dalam pelaksanaan bersama masyarakat
6. Tidak SOP pemeliharaan berbasis masyarakat
7. Sulitnya aplikasi teknologi perkawinan.
8. Tidak adanya kesempatan diklat teknologi perkawinan berbasis masyarakat.
9. Kontrol belum dilakukan pemeriksaan selama kebuntingan.

10. Penurunan mutu bibit.
11. Tidak tersedianya mobil operasional.
12. Dukungan anggaran masih rendah.
13. Rekomendasi pemeliharaan belum final dari kegiatan pemuliaan.
14. Minimnya kesempatan pembinaan kepada masyarakat.
15. Kurangnya dukungan penelitian spesifik lokasi.

Peluang

1. Mendekatkan permintaan bibit hasil perkawinan dengan masyarakat.
2. Perbaikan mutu genetik dengan memasukkan bibit baru.
3. Tercapainya produk tinggi dan hasil perkawinan.
4. Mendukung program pemberdayaan masyarakat.
5. Sinkronisasi antar program mewujudkan tujuan pembangunan
6. Mendukung pemenuhan kebutuhan bibit nasional berbasis masyarakat.

Ancaman

1. Terjadi in breeding
2. Manajemen kontrol wilayah pembinaan sulit dilakukan
3. Perubahan program
4. Pemotongan anggaran

3. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak

Kekuatan

1. Ketersediaan lahan
2. Ketersediaan sumberdaya manusia
3. Adanya Dukungan anggaran
4. Dukungan pihak swasta
5. Kepercayaan masyarakat masih tinggi
6. Dukungan kebijakan

Kelemahan

1. Belum ada SOP penerapan HPT
2. Rendahnya ketersediaan tenaga khusus HPT.
3. Belum adanya diklat khusus tentang HPT.
4. Sarana Prasarana pengembangan HPT masih rendah.
5. Minimnya dukungan penelitian HPT spesifik lokasi.

Peluang

1. Tingginya kebutuhan pakan ternak bermutu dimasyarakat
2. PNPB

Ancaman

1. Perubahan iklim (kemarau panjang)
2. Penjarahan aset tanah

4. Penguatan Kelembagaan (Peningkatan kapasitas SDM dan Layanan Teknis)

Kekuatan

1. Struktur organisasi sudah ada.
2. Dukungan peraturan pelayanan teknis sudah ada
3. Adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas.
4. SDM yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu.
5. Sudah ada jaminan mutu ISO.
6. Adanya program pengembangan ketatausahaan dan pelayanan teknis.
7. Adanya dukungan dari karyawan.
8. Terfasilitasi dukungan anggaran pengembangan SDM
9. Terfasilitasinya sarana dan prasarana.
10. Adanya SOP yang telah tersusun.

Kelemahan

1. Penempatan SDM yang tidak sesuai.
2. Program peningkatan SDM kurang menjadi prioritas
3. Lemahnya koordinasi antar bagian.
4. SOP belum dijalankan dengan optimal.
5. Dukungan anggaran SDM belum optimal
6. Peningkatan mutu SDM belum dilakukan.
7. Lemahnya manajemen organisasi.
8. Penanganan sarana dan prasarana belum proposional.
9. Tidak adanya *reward* dan *punishment*

Peluang

1. Pengembangan karier.

2. Program peningkatan mutu SDM dari kementerian.
3. Peningkatan status Balai.
4. Peningkatan IPTEK.
5. Menjamin mutu hasil
6. Menjaga kepercayaan konsumen.

Ancaman

1. Pemotongan anggaran.
2. Akses komunikasi dan informasi masih kurang.
3. Aturan birokrasi yang menghambat.
4. Terjadinya penjarahan aset (lahan).
5. Gangguan sarana umum.
6. Sentralisasi keberlanjutan program.

5. Meningkatkan promosi dan publikasi;

Kekuatan

1. SDM cukup memadai.
2. SOP teknik promosi dan publikasi sudah ada.
3. Sebagai pusat Kambing, Itik Unggul dan sapi Madura secara Nasional.
4. Tersedianya sarana dan prasarana.

Kelemahan

1. Penyebaran informasi kurang menyentuh peternak
2. Tata ruangan dan lingkungan belum rapi.
3. Belum terbentuk tim pengarah yang jelas.
4. Sistematika materi belum dibakukan.
5. Alat peraga belum lengkap.
6. Belum adanya mess untuk peserta magang/pelatihan.
7. Terbatasnya akses informasi dari masyarakat.
8. Publikasi masih terbatas.
9. Anggaran masih terbatas.
10. Promosi dan publikasi belum optimal menggunakan media sesuai sasaran.

Peluang

1. Publikasi.
2. Menjadi pusat informasi teknik produksi kambing, itik unggul dan sapi Madura.
3. Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
4. Peningkatan kemampuan SDM.
5. Bimbingan kepada masyarakat.

Ancaman

1. Munculnya *external konflik*.
2. *Overlapping* dengan kewenangan otonomi daerah (UU No. 32/2004)
3. Melemahnya animo masyarakat.

Analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dilakukan untuk mengetahui berbagai kemungkinan alternatif strategi berikut:

Strategi SO : Berbagai rencana strategis yang dibuat dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk dapat sebesar besarnya menangkap peluang, sekaligus mengurangi kelemahan yang ada.

Strategi ST : Berbagai mencari rencana strategis untuk mengatasi ancaman dengan menggunakan kekuatan sekaligus peluang yang ada.

Strategi WO : Berbagai rencana strategis untuk mengurangi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang semaksimal mungkin.

Strategi WT : Berbagai rencana strategis yang dibuat ketika dihadapkan dengan berbagai ancaman disaat terdapat berbagai kelemahan internal yang harus dihadapi.

Tabel 2.13 Kekuatan dan Kelemahan serta Peluang dan Ancaman

1. Optimalisasi Perbibitan <i>on Farm</i> :	Kekuatan	Kelemahan
	1. Tersedianya bibit unggul ternak 2. Adanya SOP pemeliharaan ternak, SOP pakan, SOP produksi dan SOP Pemuliaan ternak. 3. Tersedianya bahan baku pakan. 4. Tersedianya lahan yang cukup luas. 5. Tersedianya sarana dan prsarana. 6. SDM tersedia cukup dalam jumlah dan kualitas. 7. Tersedianya program	1. Masih adanya ternak yang tidak produktif. 2. Pelaksanaan SOP pemeliharaan, produksi, pemuliaan belum optimal. 3. Kuantitas dan kualitas bahan pakan yang tersedia tidak stabil. 4. Adanya endemik penyakit tertentu. 5. Belum optimalnya pengelolaan lahan yang tersedia. 6. Perubahan iklim. 7. Belum optimalnya perawatan sarana dan

	kerja. 8. Sebagai pusat Ettawa, itik Alabio, ayam Arab, sapi Bali, dan sapi Simbara (<i>Simental Brahman</i>) Unggul secara Nasional. 9. Tersedianya struktur organisasi pemeliharaan	prasarana. 8. Penempatan SDM belum sesuai bidangnya. 9. Penjarahan lahan BPTU-HPT. 10. Belum dilaksanakannya program kerja secara optimal. 11. Belum optimalnya penelitian spesifik lokasi
Peluang	Strategi S – O	Strategi W – O
1. Adanya Teknologi baru 2. Budaya beternak oleh masyarakat cukup tinggi 3. Peningkatan standar mutu ternak dan produk oleh konsumen. 4. Adanya dukungan dari Intansi lain (berdirinya pabrik-pabrik pakan dll)	– Penggunaan teknologi baru tepat guna mendukung pembibitan. – Memaksimal jaminan mutu terhadap hasil pembibitan – Memaksimalkan pengembangan aktifitas pembibitan dengan memanfaatkan teknologi baru. – Meningkatkan kerjasama antar dinas dan pihak swasta.	– Meningkatkan kapasitas petugas – Meningkatkan pemahaman implementasi SOP dan program kerja secara optimal – Meningkatkan kerja sama secara lebih produktif berguna – Menata penempatan SDM sesuai bidangnya. – Keterlibatan perguruan tinggi, pusat penelitian dalam penelitian.
Ancaman	Strategi S – T	Strategi W – T
1. Adanya penyakit menular/adanya endemik penyakit tertentu. 2. Perubahan iklimadanya siklus kemarau panjang. 3. Kuantitas dan kualitas bahan pakan yang tersedia tidak stabil. 4. Gangguan predator. 5. Rusaknya plasma nutfah. 6. Diakuinya plasma nutfah oleh negara lain.	- Membuat mekanisme antisipatif atas fluktuasi atau iklim yang ekstrem - Mengendalikan dan menanggulangi hama dan penyakit. - Menerapkan peraturan terkait Sumber Daya Genetik - Membuat SOP pemanfaatan plasma nutfah.	- Memaksimalkan tujuan untuk keberhasilan program - Meningkatkan struktur anggaran - Perlu adanya riset terkait plasma nutfah - Perlu adanya kerjasama dalam melindungi plasma nutfah

2. Pengembangan Perbibitan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura di masyarakat:	Kekuatan	Kelemahan
	– Tersedianya kelompok ternak siap bekerjasama. – Tersedianya sarana dan prasarana. – Adanya SOP kerjasama pengembangan bibit ternak. – Adanya petugas mendukung program. – Adanya dukungan pemerintah daerah – Adanya anggaran pemurnian ternak	– Belum ada pengetahuan dan pengalaman yang cukup. – Belum ada kontrol manajemen pemeliharaan dan pengembangan berbasis masyarakat – Belum ada standar sarana prasarana sesuai dengan ISO. – Monitoring evaluasi belum optimal – Butuh waktu dalam pelaksanaan bersama masyarakat – Tidak ada SOP pemeliharaan berbasis masyarakat – Sulitnya aplikasi teknologi perkawinan. – Tidak adanya kesempatan diklat teknologi perkawinan berbasis masyarakat. – Kontrol belum dilakukan pemeriksaan selama kebuntingan. – Penurunan mutu bibit. – Tidak tersedianya mobil operasional. – Dukungan anggaran masih rendah. – Rekomendasi pemeliharaan belum final dari kegiatan pemuliaan. – Minimnya kesempatan pembinaan kepada

		masyarakat – Kurangnya dukungan penelitian spesifik lokasi.
Peluang	Strategi S – O	Strategi W – O
1. Mendekatkan permintaan bibit hasil perkawinan dengan masyarakat. 2. Perbaikan mutu genetik dengan memasukkan bibit baru. 3. Tercapainya produk tinggi dan hasil perkawinan. 4. Mendukung program pemberdayaan masyarakat. 5. Sinkronisasi antar program mewujudkan tujuan pembangunan 6. Mendukung pemenuhan kebutuhan bibit nasional berbasis masyarakat.	– Kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan bibit unggul – Program pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggul lokal – Optimalisasi kerjasama program – Membuat SOP pengembangan bibit unggul dimasyarakat.	– Meningkatkan kapasitas SDM . – Meningkatkan struktur pembiayaan dan infrastruktur. – Membuat SOP teknis pemeliharaan berbasis masyarakat. – Melakukan monitoring evaluasi partisipatif . – Keselarasan antar bagian internal dalam mendukung pengembangan bibit. – Membuat SOP kerjasama sesuai dengan jaminan mutu lembaga. – Melakukan penelitian spesifik lokasi.
Ancaman	Strategi S – T	Strategi W – T
1. Terjadi <i>in breeding</i> 2. Manajemen kontrol wilayah pembinaan sulit dilakukan 3. Perubahan program tidak menentu. 4. Pemotongan anggaran	– Membangun kerjasama masyarakat berbasis riset – Komitmen program dan anggaran – Koordinasi dan konsultasi vertikal dan horizontal – Program berdasarkan analisis kritis pencapaian.	– Kapasitas SDM pemuliaan – Penerapan SOP berdasarkan standar ISO. – Perlu adanya penelitian terkait dengan <i>in breeding</i> .
3. Hijauan Pakan Ternak belum lengkap	Kekuatan	Kelemahan
	1. Ketersediaan lahan 2. Ketersediaan	1. Belum ada SOP penerapan HPT

	sumberdaya manusia 3. Adanya Dukungan anggaran 4. Dukungan pihak swasta 5. Kepercayaan masyarakat masih tinggi 6. Dukungan kebijakan	2. Rendahnya ketersediaan tenaga khusus HPT. 3. Belum adanya diklat khusus tentang HPT. 4. Sarana Prasarana pengembangan HPT masih rendah. 5. Minimnya dukungan penelitian HPT spesifik lokasi.
Peluang	Strategi S – O	Strategi W – O
1. Tingginya kebutuhan pakan ternak bermutu dimasyarakat. 2. PNPB 3. Pusat bibit hijauan pakan ternak bermutu.	- Penanaman lahan dengan HPT bermutu. - Mengajak pihak swasta terlibat dalam HPT. - Dukungan anggaran yang optimal - Menyusun rancangan distribusi antar pulau.	- Pembuatan SOP - Mengirim tenaga untuk diklat HPT. - Menempatkan tenaga sesuai bidangnya - program penelitian HPT spesifik lokasi melalui kerjasama penelitian
Ancaman	Strategi S – T	Strategi W – T
1. Perubahan iklim (kemarau panjang). 2. Penjarahan aset tanah 3. Serangan Hama dan Penyakit	- Menyusun titik kritis kegiatan. - Koordinasi dengan pihak agraria	- Menyusun jadwal palang kegiatan. - Keterlibatan masyarakat dalam program - Perlu adanya penelitian tentang, perubahan iklim hama dan penyakit membahayakan.
4. Pengembangan kelembagaan	Kekuatan	Kelemahan
	1. Struktur organisasi sudah ada. 2. Dukungan peraturan pelayanan teknis sudah ada 3. Adanya pembagian tugas dan wewenang	1. Penempatan SDM yang tidak sesuai. 2. Program peningkatan SDM kurang menjadi prioritas. 3. Lemahnya koordinasi antar bagian.

	yang jelas. 4. SDM yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu. 5. Sudah ada jaminan mutu ISO. 6. Adanya program pengembangan ketatausahaan dan pelayanan teknis. 7. Adanya dukungan dari karyawan. 8. Terfasilitasi dukungan anggaran pengembangan SDM 9. Terfasilitasinya sarana dan prsarana. 10. Adanya SOP yang telah tersusun.	4. SOP belum dijalankan dengan optimal. 5. Dukungan anggaran SDM belum optimal 6. Peningkatan mutu SDM belum dilakukan. 7. Lemahnya manajemen organisasi. 8. Penanganan sarana dan prasarana belum proposional. 9. Tidak adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
Peluang	Strategi S – O	Strategi W – O
1. Pengembangan karier. 2. Program peningkatan mutu SDM dari kementerian. 3. Peningkatan status Balai. 4. Peningkatan IPTEK. 5. Menjamin mutu hasil 6. Menjaga kepercayaan konsumen.	– Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, – Menambah jumlah sumberdaya manusia, – Penempatan yang sumberdaya manusia yang sesuai antara kualifikasi dengan pekerjaannya, – Pembenahan dan konsolidasi organisasi kerja, serta – Penerapan reward and punishment sistem untuk memacu kinerja karyawan. – Integrasi SOP dan Mutu – Perencanaan SDM berbasis kinerja.	- Memperbesar kesempatan mengikuti Diklat bagi SDM. - Meningkatkan motivasi berprestasi/penuntasan tugas. - Memperbaharui SOP tentang pelayanan teknis - Membangun sistem pengawasan dan pengendalian. - Memperbaiki sistem personalia. - Memperbaharui SOP Kepegawaian.

Ancaman	Strategi S – T	Strategi W – T
1. Pemotongan anggaran. 2. Akses komunikasi dan informasi masih kurang. 3. Peraturan yang menghambat bidang lain. 4. Terjadinya penjarahan aset (lahan). 5. Gangguan sarana umum. 6. Sentralisasi keberlanjutan program.	– Meningkatkan komitmen dan konsistensi pada program. – Koordinasi dan konsolidasi vertikal dan horizontal – Koordinasi dengan badan pertanahan nasional dan lembaga hukum	- Meningkatkan kapasitas organisasi. - Meningkatkan Jaminan Mutu
5. Meningkatkan promosi dan publikasi	Kekuatan	Kelemahan
	1. SDM cukup memadai. 2. SOP teknik promosi dan publikasi sudah ada. 3. Sebagai pusat Kambing, Itik Unggul, sapi secara Nasional. 4. Tersedianya sarana dan prasarana.	1. Penyebaran informasi kurang ke peternak 2. Tata ruangan dan lingkungan belum rapi. 3. Belum terbentuk tim pengarah yang jelas. 4. Sistematika materi belum dibakukan. 5. Alat peraga belum lengkap. 6. Belum adanya mess untuk peserta magang/pelatihan. 7. Terbatasnya akses informasi dari masyarakat. 8. Publikasi masih terbatas. 9. Anggaran masih terbatas.
Peluang	Strategi S – O	Strategi W – O
1. Menjadi pusat	– Meningkatkan	– Meningkatkan fasilitas.

informasi teknik produksi kambing, dan itik unggul. 2. Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak. 3. Peningkatan kemampuan SDM. 4. Bimbingan kepada masyarakat.	sosialisasi pelayanan masyarakat. – Penggunaan informasi teknologi berbasis IT – Melibatkan swasta, pemerintah daerah dan pengguna.	– Membakukan materi tutorial. – Memantapkan sistem penyusunan tim monitoring. – Meningkatkan publikasi. – Meningkatkan anggaran.
Ancaman	Strategi S – T	Strategi W – T
1. Munculnya external konflik. 2. Overlap dengan kewenangan otonomi daerah (UU No. 32/2004) 3. Melemahnya animo masyarakat.	- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi lokal, pusat. - Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat. - Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.	- Meningkatkan kapasitas internal. - Koordinasi dengan lintas sektoral

2.6 Issue-Issue Strategis

Berdasarkan analisis data dan informasi yang diungkapkan sebelumnya maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Permasalahan tersebut menjadi isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahannya melalui kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh sesuai dengan kewenangan institusi. Analisis pada matriks SWOT menghasilkan berbagai alternatif strategi. Berbagai alternatif strategi akan menjadi pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan jangka menengah.

Berbagai alternatif strategi berdasarkan issue-issue strategis yang muncul bagi BPTU-HPT Pelaihari periode 2016 -2020 adalah sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Kinerja Sumber daya manusia

Strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan komitmen kerja (bagi implementasi SOP dan program kerja secara konsisten).
- Meningkatkan kapasitas SDM (termasuk melalui seminar dan Diklat).
- Menata penempatan SDM sesuai bidangnya.
- Meningkatkan struktur penganggaran.
- Meningkatkan fasilitas infrastruktur pendukung program.
- Membuat dan menyempurnakan SOP pelayanan teknis, dan SOP manajemen organisasi.
- Membangun sistem integrasi pengendalian mutu dalam penerapan SOP.
- Membangun system pengamanan data dan plasma nuftah.
- Meningkatkan komitmen penuntasan tugas.
- Meninjau sistem penetapan beban kerja dan penugasan berimbang.
- Memperkuat berjalannya fungsi koordinasi dan konsolidasi vertikal dan horizontal.
- Sosialisasi sistem insentif pegawai, *reward and punishment*.
- Mengembangkan sistem perencanaan karier berbasis kinerja.
- Mengembangkan sistem perencanaan pengembangan SDM.

b. Masih Rendahnya Sebagian Sarana dan Prasarana Aparatur

Strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- Membangun sistem pengamanan data.
- Mengalokasikan Sumber Daya Manusia untuk pemeliharaan rutin sarana dan prasarana.
- Merencanakan dan mengadakan/mengantisipasi pemenuhan kebutuhan sarana mobilitas.
- Mengevaluasi dan rekonstruksi sistem birokrasi internal.
- Mempertahankan fasilitas dan aksesibilitas pada sumber informasi.
- Meningkatkan penggunaan sistem informasi manajemen berbasis elektronik terpadu dan terintegrasi.

C. Peluang Peningkatan Produksi & Produktivitas Bibit Unggul

Strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan pengembangan aktifitas pembibitan dengan memanfaatkan teknologi baru dan hasil pemurnian bibit.
- Membuat prosedur terencana antisipatif atas fluktuasi atau iklim yang ekstrem.
- Mencegah, mengendalikan dan menanggulangi gangguan hama dan penyakit.
- Meningkatkan penelitian dan pengembangan spesifik lokasi.
- Mengintensifkan dan menjaga plasma nuftah.
- Memelihara ketersediaan sumberdaya pendukung.
- Memperluas akses informasi dan teknologi terbaru.

D. Besarnya Peluang Penyebaran Bibit Unggul

Strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- Merintis pengembangan jaringan pemasaran baru (termasuk ekspor).
- Menyusun mekanisme (SOP) pemeliharaan dan perawatan sebelum distribusi secara berkesinambungan.
- Meningkatkan promosi produk.
- Meningkatkan sarana transportasi dan komunikasi.
- Menyusun rancangan sistem distribusi antar pulau secara efisien dan efektif.

E. Besarnya Peluang Hijauan Pakan Ternak

Strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- Menyusun SOP pelaksanaan pengembangan HPT
- Menyusun mekanisme (SOP) pemeliharaan dan perawatan HPT
- Meningkatkan promosi penggunaan HPT.
- Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan HPT.
- Menyusun rancangan sistem distribusi antar pulau secara efisien dan efektif.
- Menyusun rancangan sistem distribusi antar pulau secara efisien dan efektif
- Menyusun rencana penanggulangan Hama dan Penyakit HPT terprogram
- Menjalin kerjasama pemasaran HPT.
- Penggunaan bibit bermutu layak jual dan bermutu tinggi

E. Belum optimalnya Pelayanan dan Pembinaan kepada Masyarakat

Strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan sosialisasi tentang pelayanan masyarakat.
- Membakukan materi tutorial.
- Memantapkan sistem penyusunan tim mentoring.
- Meningkatkan publikasi.
- Meningkatkan pendekatan kepada seluruh *stakeholder*.
- Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.
- Merintis pengembangan produksi bibit ternak berbasis masyarakat.

F. Pengembangan Kerja sama dan kemitraan

Strategi yang dapat ditempuh adalah :

- Mempererat kerja sama dengan instansi lainnya dalam bentuk produksi bibit ternak, pemasaran, Hijauan Pakan Ternak bermutu.
- Menjalin kerja sama bagi pemanfaatan Sumber Daya secara lebih produktif.
- Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkumham (langsung/tdk langsung) dalam perlindungan Hak Paten.
- Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan instansi lokal/terkait lain.
- Meningkatkan sosialisasi ke berbagai pihak untuk mendukung usaha ternak masyarakat.
- Kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi berbasis masyarakat

BAB III

SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN

Rencana strategik BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2016-2020 berupaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) dalam menentukan program dan kegiatan yang tepat. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mendorong ketersediaan bibit kambing, itik dan sapi Madura unggul berskala nasional yang didasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, pencapaian sasaran melalui program dan kegiatan harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan BPTU-HPT Pelaihari. Untuk sampai pada tujuan yang diharapkan, maka perlu dirumuskan sasaran yang hendak dicapai, strategi yang efektif dan efisien, serta pendekatan yang tepat dan sesuai.

3.1. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting ditinjau dari aspek pelaksanaan tugas. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran, dan distribusi bibit ternak unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. Berangkat dari tugas tersebut maka sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2016-2020 berikut ini: 1) Optimalisasi perbibitan *on farm*, 2) Pengembangan perbibitan kambing, itik dan sapi Madura di Masyarakat, 3) Pengembangan Hijauan Makanan Ternak, 4) Penguatan kelembagaan, 5) Kerjasama dan kemitraan, 6) Pembinaan peternak kambing, itik dan sapi Madura, 7) Pengembangan teknologi terapan perbibitan kambing, itik dan sapi Madura.

Berdasarkan sasaran Renstra BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2016-2020 di atas maka program yang dilaksanakan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kemurnian ternak kambing, itik dan sapi Madura secara terprogram dan berkesinambungan, 2) Meningkatkan jumlah bibit yang didistribusi, 3) Meningkatkan pembibit guna

memenuhi kebutuhan bibit di masyarakat, 4) Meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, 5) Meningkatkan jumlah pembibit/kawasan yang terbina, 6) Meningkatkan kinerja aparatur, 7) Meningkatnya fasilitas UPT, dan 8) Terpeliharanya fasilitas UPT. Sasaran yang akan dicapai akan terlaksana jika adanya sinergi yang kuat antara berbagai unsur antara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, peternak hingga masyarakat pada umumnya.

a. Sasaran yang telah tercapai (Capaian 2010-2014)

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, capaian kinerja periode 2010-2014 perlu optimalisasi. Beberapa item program kerja tahun 2014 yang menjadi capaian seperti pengembangan Hijauan Pakan Ternak, Produksi Bibit Itik (DOD), Produksi Bibit Kambing, Pemesanan Ternak, Kegiatan Pembimbingan masih mempunyai beberapa kendala dan hambatan yang perlu dirumuskan strategi pemecahannya. Dalam program kerja tahun 2014 misalnya realisasi ketersediaan Hijauan Pakan Ternak telah melebihi target. Realisasi pengembangan mencapai 53.30 hektar atau 106.59% dari target 50 hektar. Realisasi Produksi Bibit Kambing juga melebihi target sasaran.

Untuk produksi bibit kambing jumlah kelahiran selama tahun 2014 adalah 246 ekor dari target 158 ekor atau 155.70%. Sedangkan produksi bibit 108 ekor dari target 79 ekor atau 136.71%. Untuk kegiatan penyebaran distribusi dan pemasaran belum terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Keterbatasan populasi sebagai akibat dari tidak terserapnya anggaran, pelaksanaan manajemen (SOP, SDM, Koordinasi internal) belum optimal, termasuk dukungan kebijakan. Rendahnya serapan anggaran, SOP yang kurang operasional, kualitas SDM yang rendah, minimnya sinkronisasi kebijakan berkaitan dengan legalitas lahan dan pengembangan teknologi perbibitan kambing, itik dan sapi Madura untuk menjadikan peran BPTU-HPT Pelaihari sebagai lembaga riset terapan. Kondisi ini menyebabkan sasaran utama BPTU-HPT Pelaihari belum optimal, salah satunya pesanan tidak dapat terlayani.

Sementara untuk Produksi Bibit Itik (DOD) perlu optimalisasi hingga mampu mencapai target 260.000 ekor. Pada laporan kerja tahun 2014 realisasi Produksi

Bibit Itik baru mencapai 240.299 ekor atau sekitar 91.44%. Adapun capaian kinerja tahun 2014 untuk kegiatan pembimbingan telah terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan yakni terbentuknya jumlah kelompok binaan sebanyak 32 kelompok. Berdasarkan capaian jumlah kelompok binaan BPTU-HPT Pelaihari tersebut sebagai potensi pengembangan program perbibitan kambing, itik dan sapi Madura di masyarakat.

b. Sasaran yang akan dicapai (Capaian 2016-2020)

Asumsi Capaian Kinerja

Untuk menghitung sasaran kinerja tahun 2016-2020 maka digunakan dua asumsi yakni asumsi makro dan mikro capaian kinerja.

- Asumsi makro capaian kinerja

Untuk menghitung capaian kinerja periode 2016-2020 dihitung melalui asumsi mikro:

- 1) Inflasi: (5% + 1%) tahun berjalan
- 2) Pertumbuhan ekonomi: 6%
- 3) Kurs dollar: Rp. 14.000,-

- Asumsi mikro capaian kinerja

Untuk menghitung capaian kinerja periode 2016-2020 dihitung melalui asumsi mikro dilihat dari daya beli masyarakat, *supply and demand* dan kebijakan pemerintah daerah.

Sasaran yang akan dicapai merupakan representasi pelaksanaan tujuan yang terukur dan mempunyai indikator kinerja yang jelas. Capaian sasaran BPTU-HPT Pelaihari dapat dilihat dari program Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Peternakan. Program Monev bertujuan untuk mengetahui kinerja BPTU-HPT Pelaihari yang dikaitkan dengan pembangunan peternakan secara umum yang mencakup empat tujuan pembangunan peternakanyang meliputi Percepatan Program Swasembada Daging sapi (P2SDS), Restrukturisasi Perunggasan (RP), Restrukturisasi Industri Persusuan (RPS) dan Penanggulangan Avian Influenza (AI). Program monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga salah satunya dengan pihak perguruan tinggi. Hasil dari program ini menyebutkan bahwa selama tahun anggaran 2014 pelaksanaan kegiatan di BPTU-

HPT Pelaihari dalam kaitannya dengan program pembangunan nasional masih bernilai cukup yang berarti masih perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan baik secara internal balai maupun eksternal.

Penetapan faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian sasaran tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Strategi dalam pencapaian sasaran didasarkan pada pengkajian dan analisis isu-isu strategis serta hasil analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Berangkat dari sasaran yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, Renstra BPTU-HPT Pelaihari tahun 2016-2020 menitikberatkan: 1) Optimalisasi perbibitan *on farm*, 2) Pengembangan perbibitan kambing, itik dan sapi Madura di Masyarakat, 3) Pengembangan Hijauan Makanan Ternak, 4) Penguatan kelembagaan, 5) Kerjasama dan kemitraan, 6) Pembinaan peternak kambing, itik dan sapi Madura, 7) Pengembangan teknologi terapan perbibitan kambing, itik dan sapi Madura.

Realisasi pelaksanaan program Renstra BPTU-HPT Pelaihari tahun 2016-2020 mengarah pada tercapainya beberapa aspek meliputi optimalisasi perawatan kesehatan ternak, pengolahan pakan ternak, distribusi dan pemasaran bibit ternak unggul, dan pembimbingan, monitoring dan evaluasi pembibitan. Aspek pertama adalah optimalisasi perawatan kesehatan ternak yang memfokuskan pada meminimalisir angka kematian. Pada laporan anggaran tahun 2014 angka kematian ternak itik dan kambing rata-rata sebesar 2,68% dan 2,32% dari total populasi. Program Renstra BPTU-HPT Pelaihari tahun 2016-2020 menitikberatkan untuk mengurangi angka kematian ternak yang masih tinggi.

Target sasaran berikutnya adalah pengolahan pakan ternak. Pengolahan pakan ternak dibagi menjadi dua bagian utama yaitu pengolahan pakan konsentrat dan pengelolaan hijauan pakan ternak. Dalam Renstra BPTU-HPT Pelaihari tahun 2016-2020 terkait pengolahan pakan ternak perlu memperhatikan fasilitas gudang pakan yang hanya satu buah. Kondisi ini menyebabkan pengolahan pakan konsentrat untuk pakan ternak itik dan ternak kambing dijadikan satu. Selain itu, realisasi pengolahan pakan ternak yang tercapai tahun 2014 adalah luasan lahan rumput kinggrass yang tertanami seluas 30.7 ha dan luasan gamal yang tertanami adalah 22.6 ha. Dengan demikian maka jumlah total lahan yang tertanami sebanyak 53.30 ha atau 106.59%

dari target kinerja yang ditetapkan seluas 50 ha. Dalam Renstra BPTU-HPT Pelaihari tahun 2016-2020 total luasan lahan rumput ditingkatkan semaksimal mungkin.

Pemuliabiakan dan produksi bibit itik telah maksimal dimana pada tahun 2014 pemeliharaan Generasi 4 untuk menghasilkan ternak itik generasi 5. Penetasan dilakukan sebanyak 15 periode. Penomoran ternak dilakukan secara individu berdasarkan nomor bapak dan induknya. Perkawinan dilakukan secara individual agar telur yang menetas dapat terlacak tetuanya. Sementara, produksi bibit itik (DOD) tahun anggaran 2014 baru mencapai 240.299 ekor dari target 260.000 ekor atau mencapai 91.44% dari target yang ditetapkan pada Output Kegiatan pada DIPA 2014. Untuk itu, pelaksanaan Renstra BPTU-HPT Pelaihari tahun 2016-2020 menitikberatkan pada realisasi capaian target produksi bibit itik (DOD) hingga 260.000 ekor.

Terkait optimalisasi sarana dan parasarana, target sasaran Renstra BPTU-HPT Pelaihari tahun 2016-2020 pada Seksi Prasarana dan Sarana Teknis adalah memaksimalkan serapan anggaran untuk beberapa aspek meliputi peralatan dan mesin, fasilitas berupa belanja bahan/belanja barang, penyediaan fasilitas gedung dan bangunan, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin. Berdasarkan laporan tahun anggaran 2014 serapan anggaran belum maksimal, untuk itu Renstra BPTU-HPT Pelaihari tahun 2016-2020 menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi dalam penyerapan anggaran guna mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan BPTU-HPT Pelaihari.

Sasaran berikutnya yang menjadi prioritas dalam Renstra BPTU-HPT Pelaihari tahun 2016-2020 adalah maksimalisasi distribusi dan pemasaran bibit ternak unggul. Berdasarkan laporan tahun anggaran 2014 kegiatan distribusi dan pemasaran bibit ternak unggul telah memiliki jaringan ke beberapa daerah di Indonesia terutama untuk ternak itik. Keterbatasan populasi sebagai akibat dari keterbatasan anggaran menyebabkan belum semua pesanan dapat terlayani. Misalnya, penjualan bibit kambing mengalami penurunan sebesar 31,08% dari tahun 2014 yaitu berkurang dari 97 ekor di tahun 2012 menjadi 74 ekor pada tahun 2013.

Sasaran berikutnya adalah meningkatkan pembimbingan, monitoring dan evaluasi pembibitan di masyarakat. Keterbatasan sumber daya yang ada BPTU-HPT

Pelaihari, menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan bibit kambing dan itik di seluruh Indonesia. Langkah strategis BPTU-HPT Pelaihari kemudian menerapkan program dengan melakukan pembibitan *out farm* ternak kambing dan itik di kawasan sumber bibit potensial. Kawasan potensial sumber bibit didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan bibit di kawasan itu. Berdasarkan laporan tahun 2014 telah dibina sebanyak 32 kelompok binaan yang telah diberi pembimbingan, monitoring dan evaluasi pembibitan. Dalam Renstra BPTU-HPT Pelaihari tahun 2016-2020 kelompok binaan perlu ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun mutu pembimbingan, monitoring dan evaluasi pembibitan khususnya ternak sapi Madura.

c. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan

Berdasarkan pencapaian sasaran pada program yang tertuang dalam Renstra tahun 2010-2014 perlu adanya itikad ke arah perubahan yang lebih baik. Maka dari itu, pencapaian sasaran Renstra tahun 2016-2020 yang diukur dari terlaksananya visi, misi dan tujuan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Beberapa kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran pada Renstra Tahun 2010-2014 antara lain terkait dengan tumpang tindihnya aturan dan kebijakan pemerintah daerah dengan otonomi daerah, inkonsisten kebijakan dari pemerintah pusat, masalah optimalisasi anggaran, SDM, sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi terapan.

3.2. Strategi dan Pendekatan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya pada BPTU-HPT Pelaihari maka diperlukan strategi dan pendekatan kearah perbaikan. Perbaikan tersebut sesuai dengan situasi yang terus berkembang saat ini dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan-perubahan sesuai amanat perundang-undangan. Perubahan yang dilakukan tentunya membutuhkan langkah-langkah strategis yang didukung oleh segenap pihak secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara garis besar dalam Renstra tahun 2016-2020 terdapat dua rencana strategikguna tercapainya dan terlaksananya visi, misi dan tujuan BPTU-HPT Pelaihari, yaitu strategi yang bersifat internal dan strategi eksternal. Strategi internal

mengarah pada usaha dan upaya perbaikan BPTU-HPT Pelaihari dari dalam organisasi, sementara strategi eksternal merupakan usaha dan upaya guna membangun hubungan dengan mitra dan *stakeholders* BPTU-HPT Pelaihari. Kedua strategi ini saling bersinergi dan saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan balai.

3.2.1. Strategi Internal

Strategi internal mengarah pada usaha dan upaya perbaikan kinerja BPTU-HPT Pelaihari dari dalam organisasi. Adapun usaha dan upaya yang menjadi titik tekan meliputi optimalisasi anggaran, penguatan keorganisasian, pengembangan sarana dan prasarana, pelayanan dan manajemen serta pengembangan teknologi terapan.

a. Optimalisasi Anggaran

Salah satu sasaran yang belum optimal pada periode sebelumnya adalah jumlah alokasi anggaran yang belum diserap secara maksimal (efektivitas dan efisiensi). Maka pada periode saat ini salah satu rencana strategik adalah bagaimana memaksimalkan anggaran sesuai dengan kebutuhan BPTU-HPT Pelaihari. Maka dari itu perlu penetapan anggaran yang sesuai baik anggaran yang disusun untuk pembangunan maupun anggaran untuk operasional. Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2014 mengacu pada DIPA Tahun 2014 dengan Nomor dokumen: SP DIPA-018.06.2.239455/2014 yang terbit pada tanggal 5 Desember 2013 dengan jumlah anggaran yang dialokasikan senilai Rp.19.540.000.000, yang mengalami revisi anggaran dalam rangka penghematan sehingga pagu anggaran menjadi Rp.19.216.166.000.

Pada Tahun 2015 telah disusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor dokumen: SP DIPA-018.06.2.239455/2015 yang terbit pada tanggal 14 November 2014 dengan jumlah anggaran yang dialokasikan adalah senilai Rp.25.649.402.000, yang mengalami revisi anggaran pada tanggal 09 Maret 2015 dengan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) sehingga pagu anggaran menjadi Rp.58.033.886.000. Optimalisasi

anggaran dapat dilihat dari sumber-sumber peneluaran di BPTU-HPT Pelaihari, yakni anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

1) Anggaran Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran belanja balai yang dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada BPTU-HPT Pelaihari. Adapun realisasi pengeluaran untuk belanja pegawai adalah Rp.3.113.700.453 atau 94,00% dari pagu anggaran sebesar Rp.3.312.272.000 setelah revisi penghematan. Dari angka tersebut masih ada kelebihan anggaran untuk dapat digunakan sebesar 6% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.3.312.272.000. Strategi optimalisasi penyerapan anggaran untuk bagian ini perlu: 1)Penyusunan rencana anggaran sesuai dengan implementasi anggaran, dan 2) Adanya program baru yang dirumuskan untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sisa anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan SDM dengan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.

2) Anggaran Belanja Barang

Belanja barang merupakan belanja berupa barang/jasa untuk mendukung kegiatan operasional balai. Jumlah pengeluaran yang terealisasi untuk Belanja Barang adalah sejumlah Rp.8.407.532.810 atau 79,11% dari pagu anggaran sebesar Rp.10.627.936.000, setelah revisi penghematan. Sama halnya dengan anggaran belanja pegawai, anggaran untuk belanja barang tidak terserap dengan maksimal. Berdasarkan alokasi anggaran yang telah disediakan sampai tahun 2014 masih ada sisa anggaran sebesar 21% yang artinya penyerapannya tidak maksimal. Langkah strategi untuk memaksimalkan penyerapan belanja barang dapat dilakukan dengan menambah ketersediaan baik secara jumlah maupun mutu.

3) Anggaran Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk

didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Realisasi Belanja modal pada BPTU-HPT Pelaihari adalah sejumlah Rp.4.787.235.650, atau 90,74% dari pagu anggaran sebesar Rp.5.275.958.000, setelah revisi penghematan. Anggaran belanja modal juga masih dinilai belum maksimal dengan sisa anggran sekitar 9%. Langkah strategis dalam memaksimalkan belanja modal salah satu yang dapat dilakukan adalah membuat dokumen resmi aset-aset balai yang di beberapa kasus adanya klaim sepihak dari oknum masyarakat. Selain itu, langkah lain adalah anggaran dialokasikan untuk kegiatan pengawasan dan monitoring aset secara berkala (SIMAK BMN) terintegrasi.

b. Penguatan Organisasi Balai

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan lingkup dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Langkah ini memberikan hasil terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran staregis serta visi dan misi organisasi. Instansi sebagai organisasi yang bergerak dinamis harus mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan tugas dan fungsi yang belum terpenuhi saat ini kedalam struktur organisasinya. Hasil evaluasi kinerja organisasi membuktikan masih adanya kesenjangan antara struktur organisasi dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal.

Penataan tugas dan fungsi dapat dilakukan dengan merevisi tugas dan fungsi unit kerja yang ada dan/atau menambah tugas dan fungsi baru dengan membentuk unit kerja baru. Pembentukan unit kerja baru perlu dilakukan apabila tugas dan fungsi tersebut benar-benar berbeda dengan tugas dan fungsi unit kerja yang ada, serta beban kerja unit kerja yang ada sudah cukup besar sehingga tidak mungkin menambahkan tugas dan fungsi yang baru. Selain penataan tugas dan fungsi strategi penguatan dapat dilakukan dengan pendekatan personal melalui pendidikan dan pelatihan kepada SDM yang ada. Selain itu, penguatan tata kelola organisasi

dapat dilakukan melalui konsolidasi organisasi, melalui studi banding dan *benchmarking*.

1) Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Kebijakan strategis melalui penguatan organisasi dari aspek SDM memberi titik tekan pada penguatan yang bersifat personal. Kebijakan strategis yang bersifat personal yaitu perencanaan sumber daya manusia yang makin meningkat kapasitas dan kompetensinya dengan pelatihan dan pendidikan yang sesuai, penambahan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai. Penguatan SDM secara personal dinilai akan semakin meningkatkan kapasitas dan kompetensi namun harus disusun untuk kebutuhan jangka panjang BPTU-HPT Pelaihari.

Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan penambahan jumlah SDM yang memiliki kompetensi memadai. Perencanaan strategis terkait kualitas SDM, BPTU-HPT Pelaihari memprogramkan pelatihan reguler dan berjenjang kepada karyawan diprioritaskan pada bagian pelayanan teknis, bagian informasi dan jasa produksi serta bagian pendukung lainnya dengan keahlian yang dibutuhkan. Pendidikan dan pelatihan SDM bertumpu pada penguasaan dan pemahaman tupoksi masing-masing bidang di BPTU-HPT Pelaihari. Dalam meningkatkan kualitas SDM pada BPTU-HPT Pelaihari, maka pada Renstra Tahun 2016-2020 perlu menambah jumlah kuota SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

2) Melalui Konsolidasi Organisasi

Berdasarkan hasil analisis data yang bersumber dari kajian terdahulu dengan metode GRA diperkuat melalui *Indepth Interview* dan FGD, BPTU-HPT Pelaihari masih perlu mendapat prioritas penanganan terkait belum meratanya dan terserapnya visi misi lembaga oleh para karyawannya. Hal ini terlihat dari pernyataan sebagian karyawan yang menyatakan bahwa nilai-nilai organisasi berbeda dengan sistem nilai yang dimiliki karyawan. Maka, strategi terkait penguatan aspek keorganisasian di BPTU-HPT Pelaihari perlu adanya konsolidasi organisasi yang meliputi beberapa elemen diantaranya adalah kesamaan pandangan terhadap visi dan misi, adanya *reward and punishment*,

penempatan orang pada posisi yang tepat dan pembagian peran dan tugas yang seimbang. Strategi berpijak pada tata kelola manajemen organisasi yang tepat dan terukur.

Untuk dapat mengaplikasikan rencana strategik tersebut perlu adanya langkah-langkah konkret dan diikuti dengan tindakan nyata dari berbagai pihak. Langkah fundamental yang dimaksud adalah 1) Menyamakan visi dan misi seluruh karyawan dengan berbagai teknik dan cara sehingga tercipta kesamaan pandangan dan sistem nilai antara balai dengan seluruh karyawan, 2) Membangun kerjasama tim yang kokoh, 3) Memberikan contoh yang baik kepada karyawan 4) Mengkaitkan prinsip-prinsip keagamaan dengan kinerja ekselen para karyawan, 5) Membuka wawasan dan membangkitkan semangat kerja untuk meningkatkan kinerja menuju kinerja ekselen, 6) Menggalakkan *reward* sistem dan *punishment* selain berdasarkan sistem renumerasi yang selama ini telah berjalan.

Untuk memperbaiki penyerapan nilai-nilai dan memperbaiki sikap mental karyawan, Kepala balai dapat memperbanyak sosialisasi nilai dan visi balai kepada karyawan dengan berbagai cara, misalnya: 1) Melalui penjelasan dan diskusi dengan karyawan, 2) Melalui pelatihan yang mampu menggali pemahaman dan kekompakan kinerja tim, 3) Melalui bimbingan atasannya dan tatap muka langsung, atau melalui cara lain, 4) Melalui berbagai bentuk seminar dan pelatihan termasuk pelatihan motivasi dari para motivator guna meningkatkan semangat kerja serta kekompakan kerja sehingga nilai-nilai yang diinginkan balai dalam visi dan misinya dapat terterap merata ke dalam sikap mental para karyawan. Sementara penilaian sebagian karyawan bahwa "kompetensi bagian tertentu dinilai kurang," muncul akibat adanya penumpukan pesanan ternak unggul memunculkan anggapan bahwa kompetensi karyawan dinilai kurang.

3) Melalui Studi Banding dan *Benchmarking*

Strategi lain dalam penguatan aspek keorganisasian adalah dengan melakukan studi banding dan *benchmarking*. Studi banding merupakan konsep kegiatan untuk meninjau dan melakukan evaluasi pada sebuah objek atau tempat lain.

Kegiatan studi banding dilakukan pada lembaga-lembaga yang memiliki keunggulan pada aspek atau bidang tertentu terutama lembaga yang memiliki orientasi untuk pengembangan dan penguatan organisasi.

Benchmarking merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan keorganisasian terhadap suatu proses operasi terbaik sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja. Selain itu, kegiatan *benchmarking* dapat mendorong organisasi untuk menyiapkan dasar membangun rencana operasional. Kedua pendekatan ini bertujuan antara lain untuk memperkaya pengalaman dan keterampilan SDM di BPTU-HPT Pelaihari dalam pengelolaan balai secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk *transfers knowledge* terkait penyelesaian masalah-masalah serta mengali potensi-potensi dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan di BPTU-HPT Pelaihari.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BPTU-HPT Pelaihari. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam kegiatan pembibitan hewan ternak. Di BPTU-HPT Pelaihari bagian sarana dan prasarana bernaung di bawah Seksi Sarana dan Prasarana. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan Sarana dan Prasarana meliputi instalasi kandang bibit ternak unggul, kebun hijauan pakan ternak, ladang penggembalaan, sarana teknis dan sarana pendukung. Seksi ini memberikan fasilitasi sarana baru untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan di BPTU-HPT Pelaihari. Pendekatan yang dilakukan dalam rangka mendukung berjalannya strategi dalam hal Sarana dan Prasarana adalah dengan memperhatikan dan memenuhi aspek ketersediaan, kecukupan, legalitas dan pengelolaan.

1) Ketersediaan (Availability)

Prinsip dari ketersediaan (availability) adalah kemampuan sarana dan prasarana mendukung fungsi kinerja suatu program atau kegiatan. Untuk ketersediaan lahan misalnya, BPTU-HPT Pelaihari memiliki potensi lahan yang

masih sangat luas. Lahan seluas 81.3 ha dimanfaatkan untuk perkantoran, Farm dan Lahan HPT. Untuk itu perlu adanya proses manajemen ketersediaan yang bertujuan memastikan potensi yang dimiliki berdampak positif pada layanan dan hasil kinerja yang diberikan. Dalam aspek strategi yang melibatkan sarana dan prasarana ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan antara lain adalah: 1) Ketersediaan merupakan inti dari kepuasan pelanggan, 2) Gangguan terhadap ketersediaan akan berdampak besar pada tujuan yang akan dicapai, dan 3) Ketersediaan sarana dan prasarana meningkatkan kinerja suatu program atau kegiatan.

2) Kecukupan (Ratio)

Selain ketersediaan, sarana dan prasarana juga harus diimbangi dengan kecukupan. Artinya, sarana dan prasarana penunjang harus diikuti dengan rasio yang seimbang antara ketersediaan dan kebutuhan operasional BPTU-HPT Pelaihari. Kecukupan sarana dan prasarana diukur berdasarkan jumlah ketersediaan secara kuantitas sarana dan prasarana tersebut.

3) Legalitas

Faktor legalitas relevansinya dengan aspek hukum kepemilikan lahan di masyarakat. Beberapa kasus terjadi klaim sepihak oleh oknum masyarakat terhadap sarana dan prasarana BPTU-HPT Pelaihari, khususnya masalah kepemilikan lahan. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah hukum untuk mengurangi sengketa atau konflik dengan masyarakat. Sebagai gambaran, masih ada sekitar ± 620 ha lahan milik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang belum termanfaatkan, karena masih bersengketa dengan perusahaan dan masyarakat sekitar. Adapun langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan penentuan batas-batas wilayah BPTU-HPT Pelaihari dan pembuatan dokumen resmi dalam bentuk sertifikat. Jika kondisi ini dibiarkan maka akan terjadi konflik horizontal yang pada akhirnya merugikan BPTU-HPT Pelaihari.

4) Pengelolaan

Pengelolaan sarana dan prasarana balai dimaksudkan untuk memberikan pelayanan secara profesional dalam rangka terselenggaranya kegiatan di BPTU-HPT Pelaihari secara efektif dan efisien. Upaya utama dari pengelolaan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai pada saat diperlukan. Strategi yang harus dilakukan agar pengelolaan sarana dan prasarana dapat berjalan dengan baik adalah dengan memperimbangkan beberapa prinsip antara lain: 1) Prinsip pencapaian tujuan, dimana sarana dan prasarana harus dalam kondisi siap pakai bilamana akan didayagunakan, 2) Prinsip efisiensi, dimana pengadaan sarana dan prasarana harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik sehingga dapat mengurangi pemborosan, 3) Prinsip kejelasan tanggung jawab, dimana manajemen sarana dan prasarana didelegasikan kepada SDM yang tepat dan bertanggung jawab, 4) Prinsip kekohesifan, dimana penerapan manajemen sarana dan prasarana direalisasikan dalam bentuk kerja yang kompak.

d. Pelayanan dan Manajemen

Pelayanan dan manajemen yang baik merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan cita-cita BPTU-HPT Pelaihari sebagai sentra bibit kambing, itik dan sapi Madura berskala nasional. Tanpa pelayanan dan manajemen yang prima, visi dan misi yang telah dirumuskan tidak akan berjalan dengan baik. Kepuasan pelanggan atau pengguna jasa BPTU-HPT Pelaihari adalah tujuan utama yang harus dicapai oleh manajemen BPTU-HPT Pelaihari. Pengguna jasa BPTU-HPT Pelaihari terdiri dari masyarakat umum, peternak, instansi pemerintah termasuk dinas-dinas terkait.

Merujuk pada tujuan pelayanan dan manajemen tersebut, maka dalam Renstra Tahun 2016-2020 perlu ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait pelayanan dan manajemen. Aspek-aspek penting tersebut diantaranya adalah peningkatan standar mutu pelayanan sesuai ISO baik nasional maupun internasional, perbaikan SOP dan keterbukaan informasi. Selain itu, semua kegiatan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk memberikan servis yang prima. Menyediakan produk pelayanan secara baik, cermat, cepat, ramah, aman dan tepat.

Pelayanan terbaik adalah selalu berorientasi mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan serta peka terhadap ketepatan proses dan teknologi dalam pelaksanaan tugas.

1) Peningkatan Standar Mutu Pelayanan sesuai ISO

Di era perdagangan global tuntutan terhadap mutu dan kualitas produk peternakan serta olahannya semakin nyata. Begitu juga mutu pelayanan yang menuntut pembuktian tidak hanya didasarkan pada bentuk fisik ternak, melainkan juga berdasarkan dokumen resmi yang menyertainya. Dokumen yang menerangkan ternak tersebut telah memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan, agar dapat diakui, harus dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi. Di sinilah keberadaan lembaga penguji standar mutu menjadi semakin penting peranannya, karena lembaga tersebutlah yang memiliki kompetensi untuk memberikan pengakuan atas mutu suatu produk hasil ternak berdasarkan uji yang dilakukannya.

Mengacu pada permasalahan di atas salah satu rancangan strategi tahun 2016-2020 BPTU-HPT Pelaihari adalah dengan peningkatan standar mutu pelayanan. Standar mutu pelayanan merupakan strategi dalam merangkul *stakeholders* agar tercapainya sasaran mutu pelayanan yang sesuai ISO. Salah satu bentuknya adalah penerapan Standar Pelayanan Teknis Minimal (SPM) dimana pelaksanaannya mengatur ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPTU-HPT Pelaihari yaitu melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak, diperlukan pengembangan serta peningkatan

mutu pelayanan melalui perubahan sistem. Standar Pelayanan Teknis Minimal BPTU-HPT Pelaihari akan dibuat dalam suatu dokumen standar yang dilandaskan pada visi dan misi BPTU-HPT Pelaihari itu sendiri untuk menjamin dan memastikan mutu pelayanan BPTU-HPT Pelaihari yang akan diberikan kepada masyarakat ataupun bidang industri sebagai konsumen.

2) Perbaikan *Standar Operasional Procedur* (SOP)

Berdasarkan kajian terdahulu SOP pada BPTU-HPT Pelaihari belum maksimal dan perlu peningkatan. Untuk itu perlu beberapa strategi yang perlu dipertimbangkan BPTU-HPT Pelaihari dalam kategori ini meliputi: 1) Memberikan kepastian lebih baik kepada pengguna jasa tentang; jumlah waktu yang diperlukan untuk memenuhi pesanan, dan biaya yang terjangkau, 2) Memastikan komunikasi lebih baik dengan pengguna jasa sehingga pengguna jasa dapat merencanakan kegiatan lebih pasti dan efisien melalui mekanisme pelayanan via call center atau mekanisme layanan aduan via online, 3) Sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi di BPTU-HPT Pelaihari yang lebih menjamin akurasi dan kecepatan, 4) Perbaikan sistem administrasi sehingga pelayanan untuk pelanggan lebih baik.

Langkah strategis ini akan memudahkan BPTU-HPT Pelaihari dalam melakukan pelayanan penyediaan ternak unggul kepada pelanggan. Selain itu dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelanggan perlu dibuat sistem informasi yang terintegrasi sehingga pelanggan dapat mengetahui kapan pesanan bisa diambil. Sebagai awalan yang bisa dilakukan oleh BPTU-HPT Pelaihari adalah dengan memperbaiki formulir penerimaan pesanan dimana di dalam formulir tersebut harus terdapat nomor pelayanan dan waktu pemenuhan pesanan yang dijanjikan. Strategi lain adalah perbaikan dan penambahan SOP Hijauan Pakan Ternak yang bertujuan untuk mempermudah akses dan kontrol terhadap sumber-sumber informasi di BPTU-HPT Pelaihari.

3) Keterbukaan Informasi

Bagian informasi dan jasa produksi adalah bagian yang membidangi ketersediaan informasi BPTU-HPT Pelaihari. Bagian ini memiliki tugas pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi ternak unggul

dan hijauan pakan ternak. Bagian ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih banyak berhubungan dengan pihak eksternal, khususnya pelanggan/klien. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa Bagian Informasi dan Jasa Produksi memiliki peranan yang cukup besar sebagai sumber informasi BPTU-HPT Pelaihari bagi pihak eksternal. Pemberian informasi oleh balai hendaknya mendukung dan bersifat mempromosikan balai. Pemberian informasi yang baik dan mendukung tergantung dari bagaimana keterbukaan, jenis informasi, media dan akses informasi. Permasalahannya terkait akses dan keterbukaan informasi membutuhkan penanganan yang cepat. Satu hal lagi yang perlu digaris bawahi, dengan fungsi yang lebih banyak berhubungan dengan pihak eksternal, bagian ini memiliki tanggung jawab yang lebih berat untuk tetap menjaga citra baik perusahaan. Bagian ini lebih besar peluangnya untuk dinilai sebagai perwakilan dari BPTU Pelaihari, sehingga diharapkan dapat berhubungan baik dengan pihak eksternal.

Strategi yang perlu dipertimbangkan BPTU-HPT Pelaihari dalam kategori ini meliputi: 1) Memberikan kepastian kepada pengguna jasa tentang; jumlah waktu pesanan, dan biaya yang terjangkau, 2) Memastikan komunikasi dengan pengguna jasa sehingga pengguna jasa dapat merencanakan kegiatan lebih pasti dan efisien melalui mekanisme pelayanan via call center atau mekanisme layanan aduan via online, 3) Sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi di BPTU-HPT Pelaihari yang lebih menjamin akurasi dan kecepatan, 4) Perbaikan sistem administrasi sehingga pelayanan untuk pelanggan lebih baik. Langkah strategis ini akan memudahkan BPTU-HPT Pelaihari dalam melakukan pelayanan penyediaan ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak kepada pelanggan.

e. Pengembangan Teknologi

Saat ini di era dimana teknologi dan informasi berkembang semakin cepat dan pesat, BPTU-HPT Pelaihari dirasa perlu untuk merumuskan strategi kebijakan yang mengarah pada adopsi teknologi terbaru. Langkah ini menjadi kata kunci mengingat sistem pembibitan harus menyesuaikan dengan konteks kekinian dan mulai beralih

dari paradigma pembibitan yang bersifat tradisional. Maka dari itu, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan teknologi pembibitan antara lain dengan selalu melakukan inovasi dan transfers teknologi.

1) Inovasi

Inovasi adalah salah satu langkah strategis dalam proses pengembangan teknologi di BPTU-HPT Pelaihari. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari berupaya melakukan penemuan cara baru dalam menghasilkan bibit hewan ternak yang berkualitas dan berdaya saing. Temuan-temuan baru dalam tata cara pembibitan akan menghasilkan *output* sesuai dengan standar yang diharapkan. Adapun bentuk inovasi yang dapat diimplementasikan antara lain pemurnian bibit unggul berkualitas, inovasi dalam peningkatan jumlah dan mutu pakan dan inovasi dalam penanggulangan penyakit.

2) Transfer Teknologi

Usaha pemerintah dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan harus diikuti dengan bekal pengetahuan yang cukup bagi para pengambil kebijakan maupun pelaksana teknis di lapangan. Secara khusus, BPTU-HPT Pelaihari sebagai badan yang ditugasi mendorong pembibitan hewan ternak juga harus proaktif dalam pengembangan teknologi. Untuk memenuhi hal tersebut BPTU-HPT Pelaihari mempunyai langkah strategis dalam pengembangan teknologi khususnya dalam transfer teknologi baik yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Langkah yang ditempuh salah satunya dengan menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki inovasi teknologi. Sebagai badan pelaksana teknis BPTU-HPT Pelaihari harus terbuka terhadap peluang dan potensi terkait teknologi yang perlu diadopsi.

3.2.2 Strategi Eksternal

Strategi eksternal merupakan usaha dan upaya guna membangun hubungan dengan kemitraan dengan *stakeholders* BPTU-HPT Pelaihari. Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan strategi eksternal antara lain dengan melakukan sosialisasi, sinkronisasi kebijakan antar badan/lembaga, kerjasama dan kemitraan

serta melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pengembangan BPTU-HPT Pelaihari.

a. Sosialisasi

Sosialisasi menjadi kebutuhan setiap instansi saat ini. Pada prinsipnya sosialisasi proses penanaman nilai-nilai, norma, kebiasaan dan karakter kepada suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks ini sosialisasi BPTU-HPT Pelaihari bertujuan untuk mendekatkan dan memperkenalkan diri secara kelembagaan baik visi, misi, tujuan, fungsi, program serta kegiatan yang dilakukan kepada khalayak luas. Adapun langkah dan usaha yang dilakukan pada tahap ini berupa sosialisasi melalui media massa, melalui kegiatan pertemuan-pertemuandan melalui media offline.

1) Melalui Media Massa

- Publikasi dan promosi di surat kabar baik lokal maupun nasional
- Publikasi dan promosi di radio baik lokal maupun nasional
- Publikasi dan promosi di televisi baik lokal maupun nasional
- Publikasi dan promosi melalui akun-akun media sosial
- Publikasi dan promosi melalui website dan blog

2) Melalui Pertemuan-pertemuan

- Penyelenggaraan event
- Pameran
- Bazar
- Pelatihan
- Seminar
- Workshop

3) Media Offline

- Pembuatan film dokumenter
- Leafet
- Brosur
- Selebaran

b. Sinkronisasi Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya lokal, peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan serta sistem peternakan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan terhadap produk peternakan dan mensejahterakan peternak maka perlu adanya sinergi yang kuat antar lembaga/badan. Hubungan yang sinergis tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diikuti dengan sinkronisasi kebijakan antar lembaga/badan. Sinkronisasi kebijakan menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar tata kelola BPTU-HPT Pelaihari tidak tumpang tindih (*overlapping*).

Sinkronisasi kebijakan melibatkan lembaga atau badan yang menjadi *stakeholders* dalam pengembangan bibit unggul ternak baik kambing, itik dan sapi Madura maupun produksi pakan. Sinkronisasi antar lembaga/badan dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi kebijakan yang bersifat vertikal hubungan yang dibangun dengan lembaga yang berada di atas maupun di bawah BPTU-HPT Pelaihari diantaranya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Perbibitan dan Direktorat Pakan Ternak. Sementara sinkronisasi kebijakan horizontal diantaranya hubungan dengan lembaga atau badan yang selevel dengan BPTU-HPT Pelaihari seperti, dinas peternakan, UPT, kelompok masyarakat, maupun pihak swasta.

1) Vertikal

Bentuk pendekatan dalam sinkronisasi kebijakan secara vertikal mengarah kepada pelaksanaan instruksi dan pengimplementasian kebijakan yang dicanangkan dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Perbibitan dan Direktorat Pakan Ternak. Bentuk langkah strategi terkait dengan sinkronisasi kebijakan secara vertikal adalah kemampuan BPTU-HPT Pelaihari dalam menerjemahkan amanat yang tertuang dalam aturan perundangan dan peraturan pemerintah.

2) Horizontal

Bentuk pendekatan dalam sinkronisasi kebijakan secara horizontal memberi titik tekan pada koordinasi, kerjasama maupun kemitraan dengan *stakeholders*

BPTU-HPT Pelaihari. *Stakeholders* di sini adalah pihak-pihak yang secara struktural-fungsional satu level dengan BPTU-HPT Pelaihari adalah lembaga/badan/instansi, pihak swasta, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kerjasama yang terjalin dengan stakeholder bersifat horizontal adalah menerjemahkan instruksi dari *stakeholders* yang bersifat vertikal tadi. Tujuan komunikasi secara horizontal adalah untuk merespon kebijakan-kebijakan yang dinilai tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Langkah strategis dalam membangun hubungan secara horizontal adalah dengan komunikasi, koordinasi, kerjasama maupun hubungan kemitraan.

c. Kerjasama dan Kemitraan

Membangun jalinan kerjasama dan kemitraan merupakan bagian lain dari rencana strategik dalam rangka mencapai tujuan BPTU-HPT Pelaihari. Jalinan kerjasama dan kemitraan harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan prinsip *good governance*. Hal ini tentunya akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan pembibitan hewan ternak menjadi lebih baik. Banyak pihak yang berpotensi memberikan dukungan dalam usaha mendorong tersedianya bibit unggul di BPTU-HPT Pelaihari diantaranya adalah pemerintah baik pusat maupun daerah, pihak swasta, peternak maupun pihak asing dalam hal ini lembaga yang konsen dan peduli dalam pembibitan hewan ternak. Bentuk kerjasama dan kemitraan yang dilakukan salah satunya dalam bentuk penyuluhan, kajian bersama penelitian penelitian, kerjasama pengembangan kawasan perbibitan di masyarakat.

Terbukanya peluang untuk menjalin kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta menjadi modal dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pembibitan kambing, itik dan sapi Madura. Pemerintah dalam hal ini merancang pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk peternakan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam dan merata. Sedangkan pihak swasta dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan

kecukupan produk peternakan, baik dalam hal produksi, perdagangan dan distribusi produk ternak. Dukungan kebijakan investasi perlu menyertakan peternak sebagai *end user* dan pada akhirnya memberikan peluang dalam pemberdayaan petani dan peningkatan kesejahteraan.

1) Pemerintah

Dukungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan dalam mendukung dan mendorong tersedianya bibit unggul berkualitas di BPTU-HPT Pelaihari. Dukungan pemerintah sebagai perancang regulasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan bibit unggul perlu optimalisasi baik dalam jumlah maupun mutunya. Kejasama dan kemitraan yang dibangun merupakan bentuk konsolidasi kebijakan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik.

2) Swasta

Pihak swasta juga berperan besar dalam mendukung dan mendorong tercapainya visi, misi dan tujuan BPTU-HPT Pelaihari. Pihak swasta menjadi salah satu *stakeholder* dalam membantu produksi, pemeliharaan dan pengembangan hewan ternak. Jalinan kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta perlu ditingkatkan guna membuka akses terhadap potensi bibit lokal yang berkualitas. Bentuk dukungan swasta dapat berupa pengembangan lahan untuk pakan ternak, produksi, pemeliharaan, maupun pendistribusian dan penyebaran kepada masyarakat. Selain itu, salah satu *stakeholders* yang berperan mendukung tercapainya tujuan BPTU-HPT Pelaihari adalah perguruan tinggi. Bentuk strategi yang dilakukan adalah kerjasama dalam aspek kajian dan penelitian hewan ternak.

3) Peternak

Keterbatasan sumber daya yang ada BPTU-HPT Pelaihari menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan bibit di seluruh Indonesia. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari kemudian menerapkan strategi dengan melakukan pembibitan outfarm ternak kambing dan itik di kawasan sumber bibit potensial. Kawasan potensial sumber bibit didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan bibit di kawasan itu, dan tahapan

selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan bibit kawasan lain. Langkah strategis untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut adalah dengan melakukan pembimbingan. Pembimbingan diartikan sebagai pemberian bimbingan teknis kepada pembibit yang telah terbentuk tentang teknis produksi, pemeliharaan, pemasaran bibit dan segala hal yang terkait dengan pembibitan ternak. Kegiatan pembimbingan dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada peternak baik pada tataran teknis maupun operasional. Harapannya peternak dapat melakukan prosedur pembibitan sesuai dengan ketentuan BPTU-HPT Pelaihari.

4) Asing

Pada era perdagangan global, tentu saja kita berhubungan dengan bangsa-bangsa lain sehingga dalam arus lalu lintas perdagangan baik jasa ataupun barang dari satu negara ke negara lain sudah pasti ada ketentuan-ketentuan standar yang harus dipenuhi sesuai dengan skala internasional. Untuk semua kegiatan pengujian bibit hewan ternak yang dilakukan mesti mengacu kepada standar mutu laboratorium pengujian sesuai dengan ISO 9001:2008 sehingga seluruh hasil pengujian kesehatan hewan bersifat legal dan diakui secara nasional maupun internasional. Untuk itu jalinan kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan penerapan standar pengujian internasional.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian tujuan dari penetapan sasaran yang dibahas dalam Bab III, dapat terealisasi melalui kebijakan dan program-program yang dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan BPTU-HPT Pelaihari yang mengacu kepada arah kebijakan Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program tahunan BPTU-HPT Pelaihari tahun anggaran 2014 terkait pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal. Program tersebut menjadi agenda yang harus dirumuskan dalam bentuk kegiatan dalam Renstra Tahun 2015-2019. Beberapa program dan kegiatan dalam Rensra 2015-2019 meliputi optimalisasi pembibitan *on farm*, pengembangan pembibitan di masyarakat, pengembangan hijauan makanan ternak, penguatan kelembagaan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan peternak dan pengembangan teknologi pembibitan.

4.1. Optimalisasi Pembibitan *on Farm*

Optimalisasi pembibitan *on farm* merupakan langkah strategis dalam mendukung terciptanya bibit hewan ternak yang berkualitas. Langkah ini dapat terealisasi dengan melakukan pemurnian dan persilangan hewan ternak secara mandiri dan terencana. Langkah diikuti dengan melakukan kegiatan produksi, pemeliharaan dan pemuliaan hewan ternak. Program pemurnian dan persilangan hewan ternak dilakukan baik pada kambing, itik maupun sapi Madura harus diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang berdaya guna dan terarah serta memiliki indikator capaian yang jelas. Adapun program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pembibitan *on farm* sebagai berikut:

a. Pemurnian dan Persilangan Ternak Kambing, Itik, Sapi Madura

1) Pemurnian dan Persilangan Ternak Kambing

- Pengadaan pejantan (ekor)
- Pakan konsentrat (kg)
- Pakan hijauan (kg)
- Pemeliharaan kebun pakan (Ha)
- Pengadaan obat ternak kambing (paket)
- Pengadaan bahan pemeliharaan (paket)

- Pengadaan peralatan kandang dan kesehatan hewan (paket)
- Pengadaan peralatan pemuliaan (paket)
- Pengadaan pupuk (paket)
- Pengadaan herbisida (paket)
- Penyusunan program pemuliaan ternak kambing (laporan)
- Pemuliaan ternak kambing (paket)
- Pengadaan induk kambing (ekor)
- Pengadaan identifikasi ternak kambing (paket)

2) Pemurnian dan Persilangan Ternak Itik

- Pengumpulan data primer (kegiatan)
- Konsultasi pakar (orang jam)
- Pelaporan hasil (paket)
- Pengadaan identifikasi ternak itik (paket)
- Pakan konsentrat (kg)
- Pengadaan obat ternak itik (paket)
- Pengadaan bahan pemeliharaan (paket)
- Pengadaan peralatan kandang dan kesehatan hewan (paket)
- Pengadaan peralatan pemuliaan (paket)
- Pemeriksaan sampel (tahun)

3) Pemurnian dan Persilangan Ternak Sapi Madura

- Pengadaan pejantan (ekor)
- Pakan konsentrat (kg)
- Pakan hijauan (kg)
- Pemeliharaan kebun pakan (Ha)

b. Produksi, Pemeliharaan dan Pemuliaan pada Kambing, Itik, dan Sapi Madura

Selain usaha optimalisasi pembibitan *on farm* melalui pemurnian dan persilangan hewan ternak agar mendapatkan bibit berkualitas, program berikutnya adalah melakukan kegiatan produksi, peeliharaan dan pemuliaan pada hewan ternak kambing, itik dan sapi Madura secara mandiri maupun swadaya.

1) Produksi Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura

- Kerjasama dengan peternak lokal
- Pemanfaatan potensi lokal
- Peningkatan jumlah persilangan dan teknologinya
- Peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan
- Peningkatan mutu bibit
- Perbaikan SOP

2) Pemeliharaan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura

- Kerjasama dengan peternak lokal
- Pemisahan ternak secara kelompok
- Pemberian pakan sesuai kebutuhan umur

3) Pemuliaan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura

- Perbaikan potensi genetika itik
- Melaksanakan *recording* pembibitan ternak unggul
- Melaksanakan pelestarian plasma nutfah

4) Pemeliharaan, Pemeriksaan dan Diagnosa Kesehatan Hewan

- Publikasi preventif penyakit endemic ternak
- Tindakan pencegahan penyakit ternak
- Pengendalian ancaman penyakit
- Pemeriksaan kesehatan hewan
- Pelaksanaan diagnosa penyakit hewan
- *Biosecurity* dan pengawasan kesehatan secara teratur
- Melaksanakan uji *performance* dan uji *zuriat* ternak unggul

4.2. Pengembangan Pembibitan Kambing, Itik dan Sapi Madura di Masyarakat

a. Pengembangan Perbibitan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura

1) Pengembangan Perbibitan Ternak Kambing

- Pengembangan kawasan pembibitan (OP)
- Pengembangan pembibit (OP)
- Pengadaan pejantan (ekor)
- Pakan konsentrat (kg)
- Pakan hijauan (kg)

2) Pengembangan Perbibitan Ternak Itik

- Pengembangan kawasan pembibitan (OP)
- Pengembangan pembibit (OP)
- Pengumpulan data primer (kegiatan)
- Konsultasi pakar (orang jam)
- Pelaporan hasil (paket)
- Pengadaan identifikasi ternak itik (paket)

3) Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Madura

- Pengembangan kawasan pembibitan (OP)
- Pengembangan pembibit lokal (OP)
- Penambahan jumlah pejantan (ekor)
- Pakan konsentrat (kg)
- Pakan hijauan (kg)

b. Monitoring Kawasan Perbibitan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura

1) Monitoring Kawasan Perbibitan Ternak Kambing

- Pengadaan pejantan (ekor)
- Pakan konsentrat (kg)
- Pakan hijauan (kg)

2) Monitoring Kawasan Perbibitan Ternak Itik

- Pengumpulan data primer (kegiatan)
- Konsultasi pakar (orang jam)
- Pelaporan hasil (paket)
- Pengadaan identifikasi ternak itik (paket)

3) Monitoring Kawasan Perbibitan Ternak Sapi Madura

- Penambahan jumlah pejantan (ekor)
- Pakan konsentrat (kg)
- Pakan hijauan (kg)

c. Pembinaan Kawasan Perbibitan Ternak Kambing, Itik dan Sapi Madura

1) Pembinaan Kawasan Perbibitan Ternak Kambing

- Penambahan jumlah lahan perbibitan
- Instalasi kandang bibit ternak unggul

- Kebun bibit hijauan pakan ternak
- Ladang penggembalaan
- Penambahan kawasan perbibitan

2) Pembinaan Kawasan Perbibitan Ternak Itik

- Pemurnian bibit lokal
- Instalasi kandang bibit ternak unggul
- Kebun bibit hijauan pakan ternak
- Ladang penggembalaan
- Pengadaan identifikasi ternak itik

3) Pembinaan Kawasan Perbibitan Ternak Sapi Madura

- Penambahan jumlah pejantan
- Instalasi kandang bibit ternak unggul
- Kebun bibit hijauan pakan ternak
- Ladang penggembalaan
- Penambahan pakan konsentrat
- Penambahan pakan hijauan

4.3. Pengembangan Hijauan Makanan Ternak

Program pengembangan Hijauan Makanan Ternak menjadi isu strategis dalam pengembangan bibit unggul ternak kambing, itik dan sapi Madura. Pengolahan pakan ternak di BPTU-HPT Pelaihari dibagi menjadi dua bagian utama yaitu pengolahan pakan konsentrat dan pengelolaan hijauan pakan ternak. Dengan fasilitas gudang pakan yang hanya satu buah maka pengolahan pakan konsentrat untuk pakan ternak itik dan ternak kambing dijadikan satu. Guna memaksimalkan potensi pakan ternak maka di BPTU-HPT Pelaihari akan melakukan pengembangan Hjaunan Makanan Ternak melalui tiga prioritas utama, yakni peningkatan jumlah (kuantitas), mutu (kualitas) dan jenis (varian).

a. Jumlah (Kuantitas)

Program peningkatan jumlah pakan ternak menjadi prioritas utama karena kualitas bibit unggul membutuhkan asupan gizi yang cukup. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah srategis dalam merumuskan program peningkatan pakan ternak diantaranya adalah penambahan jumlah lahan dan pemeliharaan kebun

diikuti dengan perawatan, pemupukan dan pemeliharaan. Pada tahun 2014 tercatat telah dianggarkan untuk pelaksanaan pemeliharaan kebun pakan sebesar Rp.165.600.000 meningkat dari tahun 2013 sebesar Rp.161.900.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pengolahan lahan dan pemeliharaan kebun berupa perawatan tanaman, pemupukan, pendagiran, penyulaman. Pada tahun ini juga telah dilakukan pemupukan terhadap tanaman yang telah ada dengan pupuk. Adapun program peningkatan jumlah Hijauan Makanan Ternak dapat dilakukan antara lain dengan:

1) Budidaya pakan rumput

- Pengembangan budidaya rumput gajah (*Pennisetum purpureum*)
- Pengembangan budidaya rumput setaria (*Setaria sphacelata*)

2) Budidaya pakan daun

- Pengembangan budidaya daun kaliandra
- Pengembangan budidaya daun ketela
- Pengembangan budidaya daun turi
- Pengembangan budidaya daun jagung

3) Konsentrat

- Pengembangan konsentrat ransum kambing perah sulur sari
- Pengembangan konsentrat *wheat brand*

4) Ekstra feeding

- Penambahan susu sapi skim bubuk
- Penambahan tetes tebu

b. Mutu (Kualitas)

Selain pengembangan dalam segi jumlah (kuantitas), Hijauan Makanan Ternak juga perlu dikembangkan dari segi mutu (kualitas). Pengadaan Bahan Pakan Ternak pada tahun anggaran 2014 telah dilaksanakan secara kontraktual dengan waktu pengadaan satu tahun. Dengan adanya sistem kontraktual ini kualitas bahan pakan dapat terjamin baik kualitas maupun kuantitas karena sebelum diserahkan pihak rekanan telah melaksanakan uji mutu pakan di Laboratorium, sehingga kebutuhan nutrisi bagi ternak dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan dalam peningkatan mutu pakan ternak antara lain:

- 1) Melaksanakan pembibitan hijauan pakan ternak
- 2) Melakukan pengaawasan mutu pakan ternak
- 3) Melakukan pengelolaan pakan ternak

- 4) Melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan perundang-undangan.

c. Jenis (Varian)

Program pengembangan Hijauan Makanan Ternak selain dari segi jumlah dan kualitas juga memperhatikan jenis atau varian pakan ternak. Pengembangan jenis pakan dilakukan berdasarkan jenis bahan dasar, yaitu jenis alami dan konsentrat.

1) Jenis alami

- Pengkajian jenis pakan rumput
- Pengkajian jenis pakan daun
- Pembinaan kawasan

2) Jenis olahan

- Pengkajian jenis olahan baru
- Peningkatan produksi pakan olahan baru

4.4. Penguatan Kelembagaan Balai

Program dan kegiatan BPTU-HPT Pelaihari harus sejalan dengan tupoksi organisasi. Dengan kata lain, program dan strategi yang dirumuskan merupakan bagian penting dari usaha penguatan kelembagaan. Adapun program dan kegiatan yang dapat dirumuskan untuk penguatan kelembagaan antara lain peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan koordinasi internal.

a. Peningkatkan kualitas SDM

- 1) Penguatan SDM dikelompok dasar (paket)
- 2) Honorarium pegawai (tahun)
- 3) Pelaporan dan evaluasi (tahun)
- 4) Pengadaan perlengkapan pegawai (paket)
- 5) Rapat-rapat koordinasi/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi (tahun)
- 6) Koordinasi kebijakan dan program pembangunan peternakan (OP)
- 7) Penyusunan program dan rencana kerja (paket)
- 8) Biaya administrasi dan dokumentasi (tahun)
- 9) Langganan media masa (bulan)
- 10) Pencetakan blanko/form (tahun)
- 11) Pengiriman surat dan dokumen (tahun)

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan

- 1) Survei kepuasan pelanggan (paket)
- 2) Penyusunan peta potensi ternak (paket)
- 3) Penerapan/Audit ISO (paket)
- 4) Amdal (laporan)
- 5) Pengembalian batas BPTU-KDI (paket)
- 6) Pertemuan stakeholder itik (paket)

c. Kegiatan Koordinasi Internal

- 1) Rapat bulanan
- 2) Seminar mingguan
- 3) Sosialisasi peraturan di kalangan internal
- 4) Ketersediaan acuan kerja pegawai

4.5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai

Sarana dan prasarana balai perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menunjang kegiatan di BPTU-HPT Pelaihari secara umum. Program dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan sarana dan prasarana balai antara lain dengan operasional pemeliharaan fasilitas UPT dan peningkatan fasilitas UPT.

a. Operasional Pemeliharaan Fasilitas UPT

- 1) Pemeliharaan gedung (paket)
- 2) Pemeliharaan kendaraan roda 4/6/10 (unit)
- 3) Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 3 (unit)
- 4) Pemeliharaan AC (unit)
- 5) Pemeliharaan jaringan telepon, facsimile, dan internet (paket)
- 6) Pemeliharaan pompa air (unit)
- 7) Pemeliharaan mesin tetas (tahun)
- 8) Pemeliharaan mesin choper (unit)
- 9) Pemeliharaan mixer (unit)
- 10) Pemeliharaan genset (unit)
- 11) Pemeliharaan mesin foto copy (unit)
- 12) Pemeliharaan komputer (unit)
- 13) Pemeliharaan printer (unit)
- 14) Pemeliharaan instalasi listrik (tahun)

- 15) Pembayaran rekening listrik (bulan)
- 16) Pembayaran rekening internet (bulan)
- 17) Pembayaran rekening telepon (bulan)

b. Peningkatan Fasilitas UPT

- 1) Pengadaan tabung ELPIJI (unit)
- 2) Pengadaan kandang batrayer (unit)
- 3) Pengadaan AC (unit)
- 4) Pengadaan timbangan digital (unit)
- 5) Pengadaan laptop/komputer (unit)
- 6) Pengadaan diesel pompa ban (unit)
- 7) Pengadaan trafo (unit)
- 8) Pengadaan monitor LCD (unit)
- 9) Pengadaan proyektor portabel (unit)
- 10) Pengadaan pompa air (unit)
- 11) Pengadaan mesin absensi (unit)
- 12) Pembuatan penampung air (paket)
- 13) Pembuatan bendungan (paket)
- 14) Pengadaan traktor (unit)
- 15) Pengadaan kendaraan roda 4 (unit)
- 16) Pengadaan mesin tetas (unit)
- 17) Pengadaan power sprayer (unit)
- 18) Pembuatan tempat parkir (paket)
- 19) Pengembangan kandang itik dan kambing (paket)
- 20) Pengembangan gedung penetasan (paket)
- 21) Pengembangan gedung penetasan (paket)
- 22) Rehab kandang itik dan kambing (paket)
- 23) Rehab gudang pupuk (unit)
- 24) Renovasi tempat parkir (unit)
- 25) Rehab gedung penetasan (paket)

4.6. Kerjasama dan Kemitraan

Program kerjasama dan kemitraan merupakan langkah strategis dalam membangun hubungan baik antara pihak Balai dengan lembaga atau badan di luar Balai. Kerjasama dan kemitraan dapat terjalin jika ada kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Untuk itu rumusan program dan

kegiatan harus mengedepankan manfaat baik kedua belah pihak. Adapun pihak-pihak yang mempunyai potensi dalam menjalin kerjasama dan kemitraan adalah pemerintah daerah, pihak swasta, pihak asing dan peternak.

a. Pemerintah Daerah

- 1) Sosialisasi
 - Menyusun tim monitoring internal balai
 - Meningkatkan publikasi
- 2) Promosi
- 3) Penanggulangan hama dan penyakit
- 4) Kerjasama dengan lembaga penelitian dan atau perguruan tinggi

b. Swasta

- 1) Penyediaan kawasan ternak
- 2) Penyediaan sumber pakan ternak
- 3) Pendistribusian

c. Asing

- 1) Teknologi perbibitan
 - Melakukan kajian bersama
 - Transfers pengetahuan (studi banding dan *benchmarking*)
 - Mengadopsi teknologi terbaru
 - Pengembangan teknologi terapan hasil adopsi
 - Menyusun MoU
- 2) Kualitas bibit
 - Melakukan kajian bersama
 - Transfer pengetahuan
- 3) Metode baru
 - Mengadopsi metode
 - Pengembangan metode hasil adopsi
- 4) Kapasitas SDM
 - Pertukaran tenaga ahli
 - Mengadakan Diklat
 - Studi banding

d. Peternak

- 1) Pemuliaan ternak
 - Pemuliaan Kambing Peranakan Ettawa

- Pemuliaan Itik Alabio
 - Pemuliaan Itik Mojosari
 - Pemuliaan Ayam Arab
 - Pemuliaan Sapi Bali
 - Pemuliaan Sapi Simbara (*Simental Brahman*)
- 2) Perbibitan di lokasi sumber peternakan
- Kerjasama Pengembangan Pembibitan Domba Ekor Gemuk di Jawa Timur
 - Kerjasama Pengembangan Pembibitan Kambing PE di Jawa Tengah& DIY
 - Kerjasama Pengembangan Pembibitan Kambing Boerawa di Lampung
 - Kerjasama Operasional di Semarang
- 3) Pemeliharaan di lokasi sumber peternakan
- Melakukan penyuluhan dan pembinaan
 - Peningkatan kawasan peternakan rakyat atau *Village Breeding Center* (VBC).

4.7. Pelatihan dan Pembinaan Peternak Kambing, Itik dan Sapi Madura

Paradigma yang berkembang di masyarakat setiap instansi pemerintah yang mengharuskan mewujudkan pemerintahan yang baik, guna terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna berhasil guna, serta pemerintahan yang demokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat maka diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat baik di tingkat pusat maupun di daerah. Maka dari itu, untuk merealisasikan cita-cita tersebut BPTU-HPT Pelaihari perlu merancang program dan kegiatan yang memberdayakan masyarakat khususnya peternak. Program dan kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan dan pembinaan peternak serta *show windows*.

a. Pelatihan peternak

Pelatihan merupakan program yang disusun untuk tujuan jangka pendek. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan dan petaihan yang bersifat teknis dalam pemeliharaan, produksi, pemurnian dan pengolahan pakan ternak. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Bimbingan teknis penanaman pakan ternak
- 2) Bimbingan teknis penyimpanan bahan baku pakan ternak
- 3) Bimbingan teknis pengolahan bahan baku pakan ternak

b. Pembinaan peternak

Selain program pelatihan bagi peternak, di BPTU-HPT Pelaihari juga melakukan pembinaan peternak lokal. Pembinaan merupakan program yang disusun untuk tujuan jangka panjang agar potensi masyarakat lokal dalam usaha pembibitan dapat digali dengan maksimal.

- 1) Pelestarian plasma nutfah
- 2) Pengembangan sistem bagi hasil
- 3) Bantuan bibit
- 4) Bantuan tenaga ahli

4.7. Pengembangan Teknologi Terapan Perbibitan Kambing, Itik dan Sapi Madura

a. Penelitian terapan

- 1) Kajian bersama perguruan tinggi
- 2) Kajian bersama pusat penelitian
- 3) Kajian bersama peternak dan masyarakat
- 4) Kajian pelestarian plasma nutfah

b. Inovasi Teknologi

- 1) Pelaksanaan kegiatan berbasis IT
- 2) *Update* teknologi berbasis IT
- 3) Pembuatan bank data

BAB V

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

5.1 Pengukuran Kinerja

Pembangunan hakekatnya suatu proses perubahan ke arah lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan. Sejalan dengan perubahan tersebut sesuai dengan paradigma yang berkembang setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya bersifat transparan dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan baik salah satu dari sepuluh prinsip *good governance* adalah akuntabilitas bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana kegiatan, program kebijakan, sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang di dalam renstra tingkat keberhasilan yang dicapai hendaknya dapat diukur, sehingga dengan demikian terjadi hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pelaksanaan yang dalam hal ini tercermin dalam tingkat keberhasilannya. Pengukuran kinerja terlebih dahulu disajikan dokumen Rencana Statejik BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2015-2019 yang merupakan rencana lima tahunan. Sebelum pengukuran kinerja dilakukan ada beberapa komponen rencana kinerja yang perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Masukkan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran

seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

- d. Manfaat (*Benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*Impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikoordinasikan. Indikator kinerja dimaksud hendaknya: (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan (4) tidak bias. Berdasarkan dokumen Rencana Strategik maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPTU-HPT Pelaihari(Lampiran 2)

Pengumpulan data untuk indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil secara sistematis relative mudah diperoleh, namun data untuk indikator kinerja manfaat dan dampak sulit dicapai karena memerlukan survey tersendiri guna mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dicapai sebagai dampak dari kebijakan yang dilaksanakan terhadap masyarakat. Dampak dari suatu kegiatan belum tentu bisa dilihat satu tahun atau dua tahun melainkan dalam waktu yang relative lama. Pengumpulan data untuk pengukuran kinerja hanya sampai kepada data masukan, keluaran dan hasil.

Pengukuran kinerja meliputi kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan dimaksud menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) (Lampiran 3). Untuk mengukur kinerja sasaran menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) (Lampiran 4). Untuk mengukur kinerja kegiatan (PPK) dan kinerja sasaran (PPS) digunakan rumus:

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

5.2 Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar data dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dan *output* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

6. 1 Pedoman Pelaksanaan

1. Renstra BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2015-2019 adalah merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja dalam bidang perencanaan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Seluruh unit kerja dilingkungan BPTU-HPT Pelaihari di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam renstra unit kerja masing-masing berpedoman pada RENSTRA BPTU-HPT Tahun 2015-2019.
3. RENSTRA BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung tercapainya kinerja BPTU-HPT Pelaihari.

6.2 Metode Pelaksanaan

Pencapaian visi dan misi didukung telah disusun beberapa program yang telah ditetapkan. Pengendalian pencapaian sasaran dalam RENSTRA dilakukan oleh Kepala BPTU-HPT Pelaihari yang pelaksanaan sehari-harinya dibantu seluruh unit kerja di lingkungan BPTU-HPT Pelaihari. Sumber pembiayaan untuk melaksanakan RENSTRA BPTU-HPT Pelaihari Tahun 2015-2019 bersumber dari APBN.

6. 3 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan perencanaan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada hakekatnya adalah merupakan informasi sekaligus bahan untuk penyusunan rencana periode berikutnya. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan RENSTRA adalah :

1. Monitoring dan evaluasi sangat terkait dengan pengukuran kinerja instansi BPTU-HPT Pelaihari.
2. Monitoring dan evaluasi hendaknya dilakukan secara baik dan bertanggung jawab agar terjamin obyektivitasnya.

BAB VII PENUTUP

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya. Hal ini menjadikan tantangan karena adanya ketidakseimbangan pembangunan antar regional dan antar sektoral termasuk juga didalamnya pembangunan disektor peternakan. Oleh karena itu dimasa mendatang perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan sektor peternakan antar kabupaten/kota.

Dalam rangka terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari KKN disusun Rencana Strategik BPTU-HPT sesuai dengan amanat PP. Nomor 25 Tahun 2000 dan PP. Nomor 108 Tahun 2000. Rencana Strategik BPTU-HPT Pelaihari tersebut keberhasilannya tergantung dari dukungan semua pihak, baik karyawan/karyawati, pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja BPTU-HPT Pelaihari, swasta maupun masyarakat. Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi semua pihak untuk tercapainya visi dan misi BPTU-HPT Pelaihari.

MATRIK INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN BPTU-HPT PELAIHARI TAHUN 2016-2020

No	Program /kegiatan	Kegiatan	Indikator
1	Produksi Ternak	a. Produksi Ternak Kambing, Domba, Sapi, Kerbau, Ayam Buras dan Itik. b. Pemeliharaan Ternak Kambing, Domba, Sapi, Kerbau, Ayam Buras dan Itik. c. Inseminasi Buatan	a. Meningkatnya Produksi Kambing, Domba, Sapi, Kerbau, Ayam Buras dan Itik b. Adanya Kerjasama dengan peternak lokal, ternak bebas penyakit
2	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan	a. Pengembangan Kawasan Perbibitan b. Monitoring Kawasan Perbibitan c. Pembinaan Kawasan Perbibitan	a. Adanya kawasan perbibitan b. Tersediaan bibit unggul c. Tersedianya pejantan unggul lokal d. Pakan konsentrat e. Adanya pembibit ternak
3	Pengembangan dan Pengawasan Pakan	a. Peningkatan Jumlah (Kuantitas) b. Peningkatan dan pengawasan Mutu (Kualitas) c. Peningkatan Jenis (varian)	1) Ketersediaan Pakan pakan rumput, daun, konsentrat dan ekstrak feeding 2) Adanya Jaminan Kualitas pakan (rumput, daun, konstrat, dan ekstrak feeding) 3) Ketersediaan pakan alami dan pakan buatan
4	Penguatan Organisasi BPTU-HPT	a. Peningkatkan kualitas SDM b. Peningkatan Kualitas Pelayanan c. Kegiatan Koordinasi Internal	a. Tersedianya SDM yang berkualitas b. Meningkatnya Kualitas pelayanan sesuai ISO 2001 c. Pemahanan tugas dan fungsi Balai,

			dan Ketersediaan acuan kerja pegawai
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai	a. Operasional Pemeliharaan Fasilitas UPT b. Peningkatan Fasilitas UPT.	a. Ketersediaan Operasional pemeliharaan Fasilitas UPT b. Penambahan fasilitas UPT
6	Kerjasama dan Kemitraan	a. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah b. Kerjasama dengan swasta c. Kerjasama dengan petani d. Kerjasama dengan Asing	1. Adanya sosialisasi, promosi dan penggalangan penyakit dan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, peternak, dan asing 2. Penyediaan kawasan ternak, penyediaan pakan dan distribusi hasil 3. Membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kawasan peternakan 4. Melakukan kajian teknologi secara bersama, mengadopsi teknologi tepat guna dan magang dan studi banding
7	Pelatihan dan Pembinaan Peternak Kambing, Domba, Sapi, Kerbau, Ayam Buras dan Itik	a. Pelatihan peternak b. Pembinaan peternak c. Pembinaan peternak	Ketersediaan SDM peternak yang dapat mendukung program
8	Rintisan Teknologi Terapan Perbibitan Kambing, Domba, Sapi, Kerbau, Ayam Buras dan Itik	a. Penelitian terapan b. Inovasi Teknologi	

Lampiran 1.

**FORM RENCANA STRATEJIK
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN 2016 S.D. 2020**

Instansi : BPTU-HPT PELAIHARI

Visi :

Misi :

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan mutu genetik Plasma Nutfah	Meningkatnya kemurnian darah ternak Itik dan kambing secara terprogram dan berkesinambungan	• Jumlah Parent Stock itik lokal (ekor) • Bibit itik lokal hasil pemurnian • Jumlah kambing lokal hasil pemurnian	Memurnikan ternak itik, kambing dan sapi Madura secara terprogram dan berkesinambungan	Optimalisasi pembibitan onfarm	
2	dst					
3	dst					

4	dst					
5	dst					
6	dst					
7	dst					
8	dst					

TARGET KINERJA SASARAN PER MIS

Misi 1: Melakukan Pemuliaan dan Produksi Ternak kambing, domba dan itik

Tujuan	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1. Meningkatkan mutu genetik Plasma Nutfah	- Ps Itik Lokal (Ekor)	486.795	516.002	552.123	596.292	649.959
	- Itik lokal hasil pemuliaan (Ekor)	462	490	524	566	617
	- Kambing Lokal hasil pemurnian (Ekor)	257	273	292	315	343
2. Meningkatkan Produktivitas Ternak Itik Lokal	- Itik hasil persilangan (Ekor)	50.281	53.298	57.029	61.591	67.135

Misi 2 : Meningkatkan produksi dan penyebaran bibit kambing, itik dan sapi madura unggul secara berkesinambungan;

Tujuan	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1. Meningkatkan Penyebaran bibit unggul	- Bibit Itik lokal yang disebar (Ekor)	478.605	507.321	542.833	586.260	639.024
	- Itik hasil persilangan yang disebar (Ekor)	50.208	53.220	56.946	61.501	67.037
	- Bibit kambing yang disebar (Ekor)	244	258	276	298	325
2. Mengembangkan pembibitan ternak kambing, domba dan itik di masyarakat	- Pembibit ternak itik yang terbentuk (Pembibit/Kawasan Pembibit)	1	1,1	1,2	1,3	1,4

Misi 3 : Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat peternak

Tujuan	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	- Jumlah jenis layanan (Layanan)	4	4	5	5	6
	- Jumlah pemesanan yang terlayani (Persen)	37	39	42	45	49
2. Mengembangkan pembinaan kepada masyarakat	- Kawasan Pembibitan ternak kambing dan domba (Pembibit/Kkawasan)	4	4	5	5	6
	- Pembibit ternak itikyang dibina (Pembibit/Kawasan Pembibit)	7	8	8	9	10

Misi 4 : Menjalankan institusi dengan tata kelola yang baik

Tujuan	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatkan Kapasitas SDM	- Paket pelatihan motivasi (Orang)	5	6	6	6	7
	- Paket pelatihan teknis dan non teknis (Paket)	11	11	12	13	14
2. Meningkatkan sarana dan prasarana	- Pemeliharaan fasilitas UPT (Persen)	105	111	119	129	140
	- Pengadaan fasilitas UPT (Persen)	105	111	119	129	140

Lampiran 2

FORM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPTU-HPT PELAIHARI TAHUN 2016

No.	Uraian Fungsi	Rencana Kerja (Subkegiatan/Output)	Rencana Kerja (Sub Output)	Anggaran (Rp)	Mata Anggaran	Direktorat teknis
1	Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemeliharaan bibit ternak unggul;	• Pemeliharaan Ternak • Kesehatan Hewan • Pengelolaan Pakan Ternak • Perawatan Kesehatan Ternak Kambing • Pemuliabiakan dan Produksi Bibit Kambing •	• Pemeliharaan Bibit Ternak Itik • Pemeliharaan Bibit Ternak Kambing • Perawatan Kesehatan Ternak Itik • Perawatan Kesehatan Ternak Kambing	Rp.58.033.886.000,-	DIPA-018.06.2.239455	Kesehatan Hewan
2	Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;					
3	Pelaksanaan uji <i>performance</i> dan uji <i>zuriat</i> ternak unggul;					
4	Pelaksanaan <i>recording</i> pembibitan ternak unggul;					
5	Pelaksanaan pelestarian plasma nuftah;					
6	Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;					
7	Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul;					

8	Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;					
9	Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;					
10	Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;					
11	Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;					
12	Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak;					
13	Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul;					
14	Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul;					
15	Memberikan pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul;					
16	Pengelolaan sarana dan sarana teknis; dan					
17	Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.					

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPTU-HPT PELAIHARI TAHUN 2017

No.	Uraian Fungsi	Rencana Kerja (Subkegiatan/Output)	Rencana Kerja (Sub Output)	Anggaran (Rp)	Mata Anggaran	Direktorat teknis
1	Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemeliharaan bibit ternak unggul;	• Pemeliharaan Ternak • Kesehatan Hewan • Pengelolaan Pakan Ternak • Perawatan Kesehatan Ternak Kambing • Pemuliabiakan dan Produksi Bibit Kambing •	• Pemeliharaan Bibit Ternak Itik • Pemeliharaan Bibit Ternak Kambing • Perawatan Kesehatan Ternak Itik • Perawatan Kesehatan Ternak Kambing	Rp.58.033.886.000,-	DIPA-018.06.2.239455	Kesehatan Hewan
2	Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;					
3	Pelaksanaan uji <i>performance</i> dan uji <i>zuriat</i> ternak unggul;					
4	Pelaksanaan <i>recording</i> pembibitan ternak unggul;					
5	Pelaksanaan pelestarian plasma nuftah;					
6	Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;					
7	Pelaksanaan pengembangan bibit					

	ternak unggul;					
8	Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;					
9	Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;					
10	Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;					
11	Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;					
12	Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak;					
13	Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul;					
14	Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul;					
15	Memberikan pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul;					
16	Pengelolaan sarana dan sarana teknis; dan					
17	Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.					

Lampiran 3.

**FORM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN: 2016**

Program	Kegiatan					Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Rencana Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja dan Satuan	Anggaran	Realisasi Tingkat Capaian (Target)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Optimalisasi Pembibitan on Farm	a. Pemurnian dan Persilangan Ternak Kambing, Itik, Sapi Madura b. Produksi, Pemeliharaan dan Pemuliaan pada Kambing, Itik, dan Sapi Madura	• Pemurnian dan Persilangan Ternak Kambing • Pemurnian dan Persilangan Ternak Itik • Pemurnian dan Persilangan Ternak Sapi Madura	• Pengadaan pejantan (ekor) • Pakan konsentrat (paket) • Pakan Hijauan (paket) • Pemeliharaan kebun pakan (Ha) • Pengadaan Obat ternak kambing (paket) • Pengadaan Bahan Pemeliharaan (paket) • Pengadaan Peralatan Kandang dan Keswan (paket) • Pengadaan peralatan pemuliaan (paket) • Pengadaan Pupuk (Paket) • Pengadaan Herbisida (paket)	- 5,500 1,000 53,240,000 76,218,468 - 28,098,560 12,100,000 85,753,010 48,510,000			DIPA PELAIHARI/DIPA DIRJEN TEKNIS
dst							

**FORM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN: 2017**

Program	Kegiatan					Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi Tingkat Capaian (Target)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**FORM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN: 2018**

Program	Kegiatan					Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi Tingkat Capaian (Target)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**FORM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN: 2019**

Program	Kegiatan					Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi Tingkat Capaian (Target)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**FORM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN: 2020**

Program	Kegiatan					Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi Tingkat Capaian (Target)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Lampiran 4.

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN 2016**

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kemurnian ternak kambing, itik dan sapi Madura secara terprogram dan berkesinambungan	• Produksi Bibit Itik (DOD) • Produksi Bibit Kambing	260.000 ekor 158 ekor	240.299 ekor 246 ekor	91.44% 155.7%	Target Tercapai Melebihi Target

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN 2016**

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN 2017**

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN 2018**

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN 2019**

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)